



KECAMATAN CICENDO

JL. PURABAYA NO. 1

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

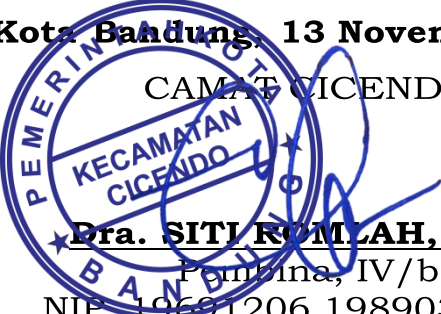
Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cicendo selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat Kecamatan Cicendo. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintahan, kelurahan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas warga, menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen ini.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cicendo dapat semakin efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Cicendo, demi mewujudkan Kota Bandung yang UTAMA.

Kota Bandung, 13 November 2025

CAMAT CICENDO

Dra. SITI RUMAH, M.Si.
Pembina, IV/b
NIP. 19691206 198903 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perubahan paradigma dari *stering* kepada *empowerment* seperti kondisi dewasa ini, telah menuntut aparat pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara prima. Kondisi demikian tidak hanya dipengaruhi oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah semata, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lebih dari itu, dipacu pula oleh tuntutan eksternal yang mengharuskan aparat pemerintah memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Arah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan tersedianya aparat pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Sementara itu kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai representasi pembuat buah karyanya.

Pada sisi pemerintah yang kompetitif tersebut, pemberian otonomi luas kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar masing-masing Kabupaten/Kota secara otonom mampu mengemas diri untuk memasuki era kompetisi. Dalam konteks kompetisi itulah kemampuan kompetitif pemerintah ditentukan oleh tersedianya sumberdaya manusia aparat pemerintah yang profesional dan berkualitas.

Untuk itu Kecamatan Cicendo harus memiliki Visi dan Misi karena dengan adanya visi diharapkan langkah operasional selanjutnya dapat dibuat dengan mengacu pada Visi Organisasi yang telah disusun, dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang akan datang, adapun Visi Pemerintah kota Bandung adalah:

"MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pembangunan Nasional"

Penyampaian Renstra ini merupakan salah satu pertanggungjawaban, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan dokumen perencanaan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
DAFTAR GRAFIK	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029	1
1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029	7
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicendo	10
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cicendo	10
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Cicendo	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	68
2.1.5. Mitra Kecamatan Cicendo	69
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	72
2.2.1. Permasalahan	72
2.2.2. Isu Strategis.....	86
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	97
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.....	97
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.....	99
3.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) Kecamatan Cicendo	102
3.4. Strategi Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029	104
3.5. Arah Kebijakan Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo tahun 2025-2029	111
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	114
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 114	
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Cicendo.....	134
BAB V PENUTUP	140

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN	22
TABEL 2.2 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN	24
TABEL 2.3 BATAS WILAYAH KECAMATAN CICENDO	25
TABEL 2.4 PEMBAGIAN WILAYAH KECAMATAN CICENDO	26
TABEL 2.5 DATA KEPENDUDUKAN KECAMATAN CICENDO	26
TABEL 2.6 TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2029-2025	27
TABEL 2.7 CAPAIAN IKU KECAMATAN CICENDO TAHUN 2020-2023	29
TABEL 2.8 CAPAIAN IKU KECAMATAN CICENDO TAHUN 2024 BERDASARKAN RPD 2024-2026	30
TABEL 2.9 (T-C.23) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CICENDO TAHUN 2020-2024	31
TABEL 2.10 REVIU PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CICENDO TAHUN 2020-2024	35
TABEL 2.11 (T-C.24) ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN CICENDO	37
TABEL 2.12 DATA KEPEGAWAIAN	45
TABEL 2.13 DATA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	45
TABEL 2.14 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019-2025	47
TABEL 2.15 DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN	49
TABEL 2.16 NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	50
TABEL 2.17 DATA PERMASALAHAN PERSAMPAHAN	53
TABEL 2.18 DATA PERMASALAHAN KETAHANAN PANGAN	54
TABEL 2.19 DATA STUNTING	56
TABEL 2.20 SARANA DAN PRASARANA KONDISI RUSAK	58
TABEL 2.21 REKAPITULASI DATA SARANA PRASARANA KONDISI RUSAK	61
TABEL 2.22 DATA UMKM	63
TABEL 2.23 DATA KEMISKINAN KECAMATAN CICENDO	64
TABEL 2.24 DATA SATLINMAS DAN SATKAMLING AKTIF	67
TABEL 2.25 MITRA KECAMATAN CICENDO	70
TABEL 2.26 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CICENDO ..	93
TABEL 3.1 SASARAN KECAMATAN CICENDO	100
TABEL 3.2 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO	101
TABEL 3.3 TABEL ANALISIS SWOT TERHADAP LINGKUNGAN	102
TABEL 3.4 TABEL STRATEGI SWOT (SO, ST, WO, WT)	104
TABEL 3.5 MATRIKS ANALISIS SWOT	105
TABEL 3.6 KETERKAITAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO	108
TABEL 3.7 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO	112
TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO	116
TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	123
TABEL 4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	132
TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN 2025-2029	135

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CICENDO.....	11
GAMBAR 2.2 PETA WILAYAH KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG	25
GAMBAR 2.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	89
GAMBAR 3.1 MISI KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029.....	98
GAMBAR 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	98
GAMBAR 3.3 KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA	99
GAMBAR 3.4 KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO	99
GAMBAR 3.5 <i>LOGIC</i> MODEL.....	110
GAMBAR 3.6 PENAHAPAN PEMBANGUNAN RENSTRA KECAMATAN CICENDO TAHUN 2025-2029	110

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI)	23
GRAFIK 2.2 GRAFIK KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI	24
GRAFIK 2.3 GRAFIK CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	27
GRAFIK 2.4 DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN	49
GRAFIK 2.5 CAPAIAN NILAI IKM	50
GRAFIK 2.6 DATA PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI.....	53
GRAFIK 2. 7 KETAHANAN PANGAN (RW BURUAN SAE)	55
GRAFIK 2.8 PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING	57
GRAFIK 2. 9 SARANA DAN PRASARANA KONDISI RUSAK.....	61
GRAFIK 2.10 UMKM KECAMATAN CICENDO	63
GRAFIK 2.11 DATA KEMISKINAN KECAMATAN CICENDO	65
GRAFIK 2.12 GRAFIK SATLINMAS DAN SATKAMLING	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Definisi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan Ketentuan Umum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029.

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara *de jure* terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi secara *de facto* berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Cicendo oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Amanat Undang-Undang N0. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Nilai Strategis dari Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah bahwa dokumen perencanaan PD berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Cicendo Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2025-2029. Dalam menyusun

RENSTRA ini juga selain berpedoman pada RT RW Kota Bandung, juga perlu memperhatikan RT RW kecamatan sekitar, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar Kecamatan serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 bahwa penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Tahapan Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
- c. Tahapan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029;
- d. Tahapan Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029;
- e. Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029;
- f. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- g. Penetapan Penstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.

Renstra SKPD Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional/daerah dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga Kinerja Pembangunan Daerah dapat berkesinambungan dan memiliki keterkaitan dalam agenda mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Undang-undang ini mengatur mengenai batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dan menetapkan bahwa Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 adalah dasar/acuan Kecamatan Cicendo untuk menjalankan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi alat untuk mengukur kinerja penyelenggaraan bidang urusan/unsur Kecamatan Cicendo yang mendukung pelaksanaan tahapan pertama perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung tahun 2025-2029 adalah:

1. Pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Cicendo mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
2. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang urusan/unsur Kecamatan;
3. Tersusunnya dokumen yang menggambarkan kebermanfaatan Kecamatan Cicendo berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan sasaran dalam RPJMD Kota Bandung; dan
4. Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis Melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani Serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cicendo Kota Bandung tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD

(Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029 dan susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN CICENDO

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicendo
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cicendo
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Cicendo
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Cicendo
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Cicendo
 - 2.1.6 Dukungan BUMD
 - 2.1.7 Kerjasama Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Permasalahan Kecamatan Cicendo
 - 2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Cicendo

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029
- 3.3 Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029
- 3.4 Perumusan Dan Penetapan Strategi Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029
- 3.5 Strategi Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo tahun 2025-2029
- 3.6 Arah Kebijakan Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Cicendo

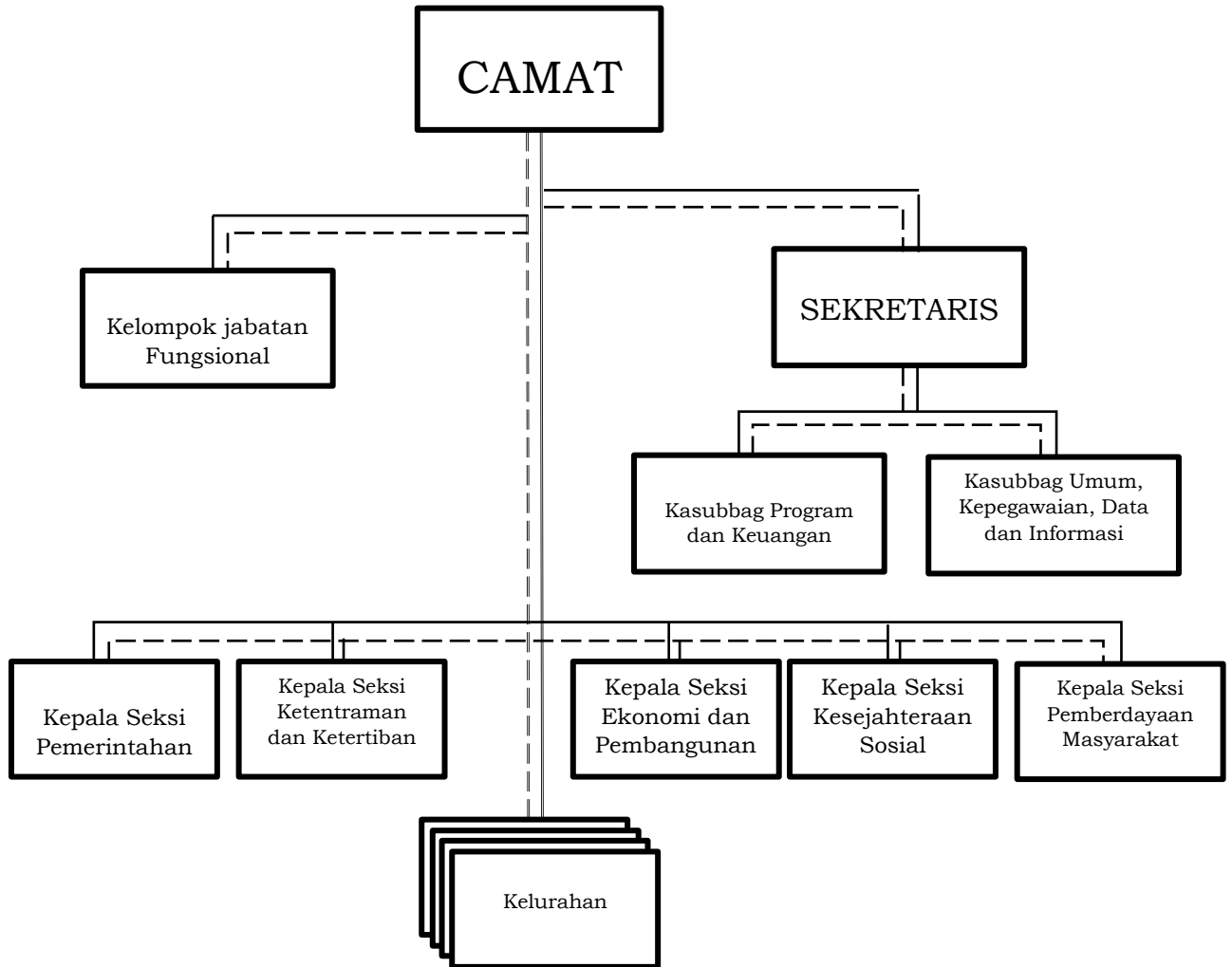
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Cicendo

Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Bandung, telah dibuat kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung. untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat, ditetapkan juga Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cicendo

Sumber: Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas poko dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, program kerja, anggaran dan kinerja Kecamatan berdasarkan Kebijakan Umum Daerah Kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
4. Mengoordinasikan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
6. Mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

7. Mengoordinasikan penyelenggaraan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
11. Mengoordinasikan pencapaian standar pelayanan minimal di Kecamatan;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
13. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LKPD, LAKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan

- lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, Data dan Informasi, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, serta pengoordinasian tugas-tugas seksi;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
 - e. Mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
 - f. Mengoordinasikan manajemen kepegawaian lingkup kecamatan;
 - g. Mengoordinasikan penatausahaan BMD;
 - h. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
 - l. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat dan Kecamatan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Data dan Informasi

- 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan lingkup pelayanan administrasi umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - d. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Kecamatan;
 - g. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - h. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Tabungan Perumahan, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk

- Mendapatkan Pembayaran Tunjangan dan administrasi kepegawaian lainnya;
- j. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi penatausahaan BMD lingkup Kecamatan;
 - m. Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik di lingkungan Kecamatan;
 - n. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- 2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
- 3. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

- Kecamatan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - e. Menganalisis data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - g. Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan Renstra, Renja, program kerja dan anggaran serta kinerja Kecamatan;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - k. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pemerintahan.

3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Pemerintahan;
 - b. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. Melaksanakan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil serta domisili orang asing;
 - e. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - f. Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - g. Membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan;
 - h. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
- d. melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi pendegahan dan penanggulangan bencana;
- f. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- g. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup Kesejahteraan Sosial.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang

- kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial ditingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- e. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- f. membantu Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ekonomi dan pembangunan.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - d. melaksanakan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - e. melaksanakan inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

- f. melaksanakan fasilitasi pembangunan sara dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- g. melaksanakan fasilitasi upaya pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan program kebersihan dan keindahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, dan pembangunan dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan inventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
 - f. membantu Camat melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, transmigrasi;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Cicendo

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Cicendo sebagai perangkat daerah yang unggul. Komposisi jumlah pegawai Kecamatan Cicendo dengan latar belakang pendidikan Sarjana atau Diploma lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar dalam kemajuan dan inovasi organisasi.

Adapun kondisi jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut:

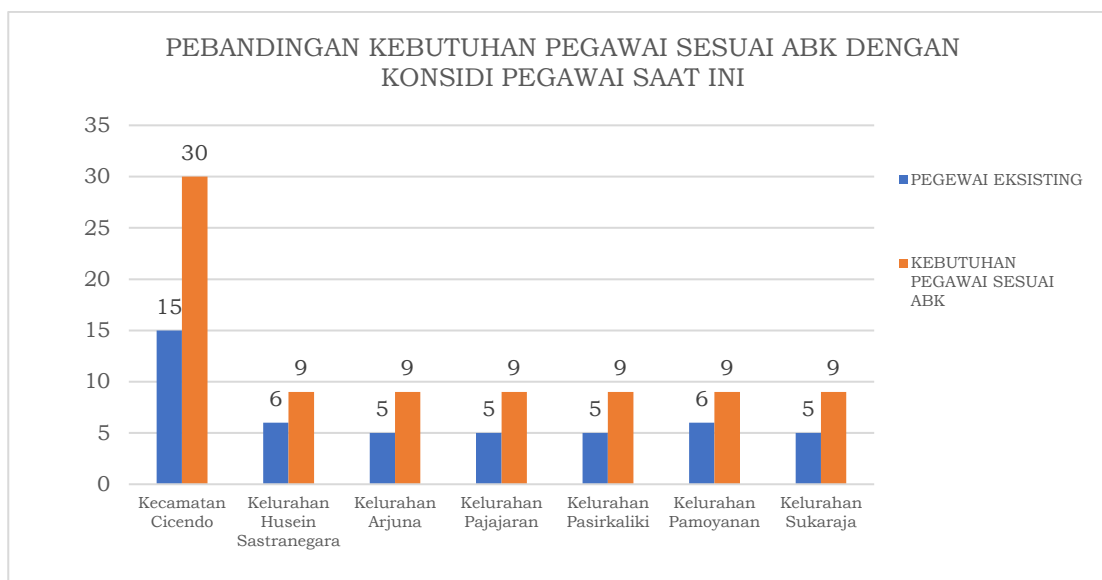
Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

NO	URAIAN	ES. 3	ES. 4	Fungsional Umum	PPPK	JUM LAH	(KEBUTUHAN PEGAWAI)
1	Kecamatan Cicendo	2	5	6	2	15	(30)
2	Kelurahan Husein Sastranegara	-	5	1		6	(9)
3	Kelurahan Arjuna	-	4	1		5	(9)
4	Kelurahan Pajajaran	-	4	1		5	(9)
5	Kelurahan Pasirkaliki	-	4	1		5	(9)
6	Kelurahan Pamoyanan	-	5	1		6	(9)

NO	URAIAN	ES. 3	ES. 4	Fungsional Umum	PPPK	JUM LAH	(KEBUTUHAN PEGAWAI)
7	Kelurahan Sukaraja	-	4	1		5	(9)
JUMLAH		2	31	12	2	47	(84)

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cicendo, Bulan Juni Tahun 2025

Grafik 2.1 Grafik Sumber Daya Manusia (Pegawai)



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cicendo Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 47 orang, sementara berdasarkan analisis beban kerja kebutuhan pegawai sebanyak 84 orang pegawai, artinya baru 55,95% pegawai yang dapat dipenuhi dari total kebutuhan pegawai di Kecamatan Cicendo. Yang terdiri dari pegawai eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan Cicendo, Eselon IVA sebanyak 9 orang yaitu 3 (Tiga) kepala Seksi dan 6 (empat) Lurah, Eselon IVb sebanyak 22 orang yaitu para kepala sub bagian pada Sekretariat Kecamatan dan Kasi pada Kelurahan. Fungsional Umum sebanyak 12 orang dengan jumlah pelaksana terbanyak berada di Sub Bagian Umum Kepegawaian, Data dan Informasi dan PPPK sebanyak 2 Orang di Kecamatan Cicendo. Serta rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja.

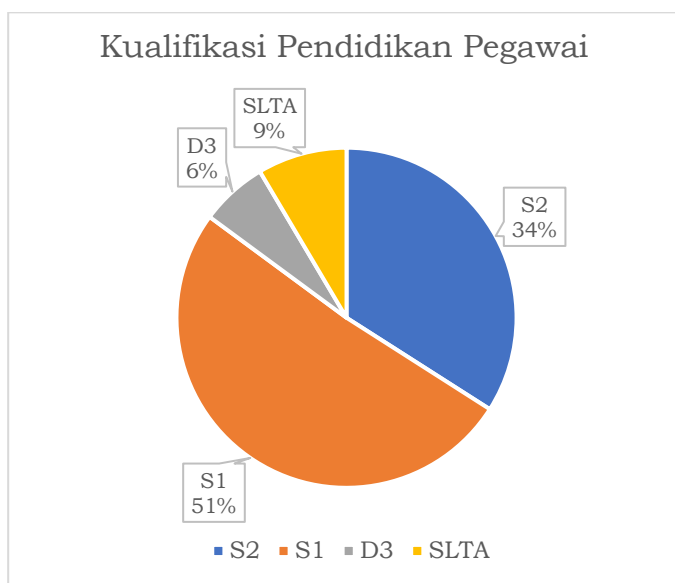
Serta kualifikasi Pendidikan di lingkungan Kecamatan Cicendo, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jml
1	Kecamatan Cicendo		5	7	2	1	15
2	Kelurahan Husein Sastranegara			3	1	1	5
3	Kelurahan Arjuna		4	2			6
4	Kelurahan Pajajaran		2	1		2	5
5	Kelurahan Pasirkaliki		1	5			6
6	Kelurahan Pamoyanan		1	4			5
7	Kelurahan Sukaraja		3	2			5
JUMLAH			16	24	3	4	47

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Cicendo, Bulan Juni Tahun 2025

Grafik 2.2 Grafik Kualifikasi Pendidikan Pegawai



Kondisi kekosongan pegawai dan kualifikasi serta kompetensi pegawai ini berisiko pada menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Cicendo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, sampai dengan akhir Juni 2025, secara keseluruhan masih terdapat kekurangan sumber daya manusia. Dengan kondisi sumber daya manusia yang ada, Kecamatan Cicendo berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Teknis Non ASN (*Outsourcing*) untuk

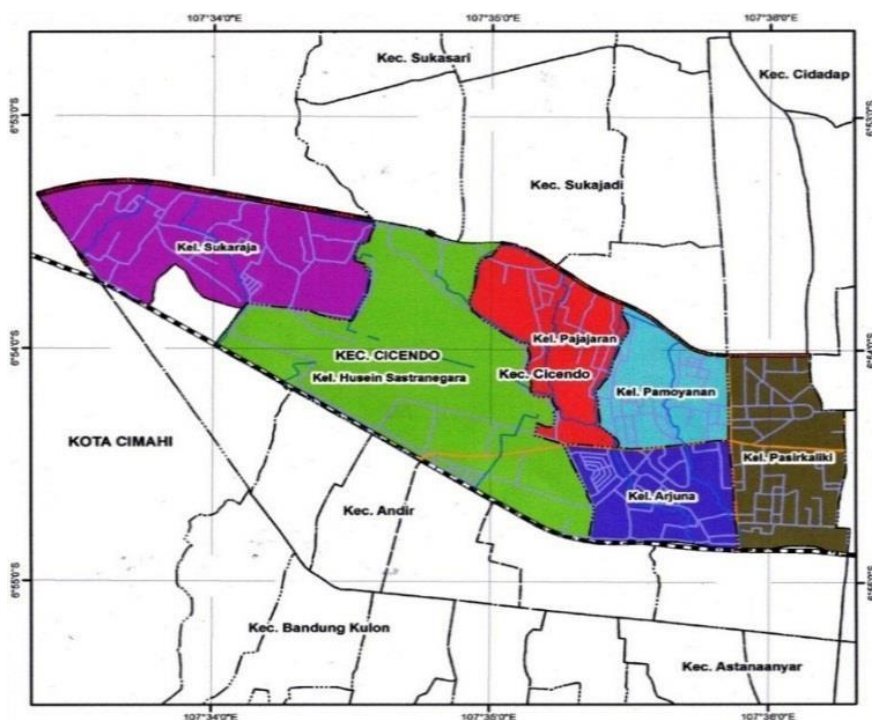
mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas Kecamatan Cicendo.

Demografi dan Geografi Kecamatan Cicendo

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara *de jure* terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Batas Wilayah Kecamatan Cicendo

Utara	Kecamatan Sukajadi
Selatan	Kecamatan Andir
Barat	Kota Cimahi
Timur	Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Sumur Bandung



Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Cicendo Kota Bandung

Kecamatan Cicendo berada di sisi barat yang cukup strategis karena menjadi pusat transportasi atau gerbang masuk Kota Bandung bagi wisatawan dan kunjungan tamu kenegaraan.

Luas wilayah Kecamatan Cicendo sekitar 6,88 km² (atau 688,69 hektar) dengan tingkat kepadatan penduduk 104.165 Jiwa/Km². Adapun pembagian wilayah dan data kependudukan di Kecamatan Cicendo sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pembagian Wilayah Kecamatan Cicendo

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Husein Sastranegara	12	77
2.	Arjuna	8	74
3.	Pajajaran	10	69
4.	Pasirkaliki	10	60
5.	Pamoyanan	6	54
6.	Sukaraja	10	71
Jumlah		56	405

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2025

Tabel 2.5 Data Kependudukan Kecamatan Cicendo

UNIT KERJA	JUMLAH					JML KK
	RT	RW	JML PENDUDUK			
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
KECAMATAN CICENDO	405	56	36.212	54.334	90.546	27.573
HUSEIN SN	77	12	6.644	9.958	16.602	4.583
ARJUNA	74	8	6.730	10.113	16.843	3.554
PAJAJARAN	69	10	7.960	11.959	19.919	7.333
PASIRKALIKI	60	10	3.835	5.786	9.621	3.223
PAMOYANAN	54	6	2.945	4.371	7.316	2.345
SUKARAJA	71	10	8.098	12.147	20.245	6.535

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Cicendo Tahun 2025

Berdasarkan data kependudukan diatas Kecamatan Cicendo terdiri dari 6 Kelurahan, 56 RW dan 405 RT, jumlah penduduk mencapai 90.546 Jiwa yang terbagi atas 36.212 laki-laki dan 54.334 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 27.573 KK. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat adalah Kelurahan Pajajaran dengan jumlah penduduk 19.919 Jiwa dengan luas wilayah 73 hektar atau sekitar 0,73Km².

Selain sumber daya manusia aparatur, sumber daya yang penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cicendo yaitu anggaran. Dari sisi anggaran, Kecamatan Cicendo mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2019 – 2025 beserta realisasinya sebagai berikut:

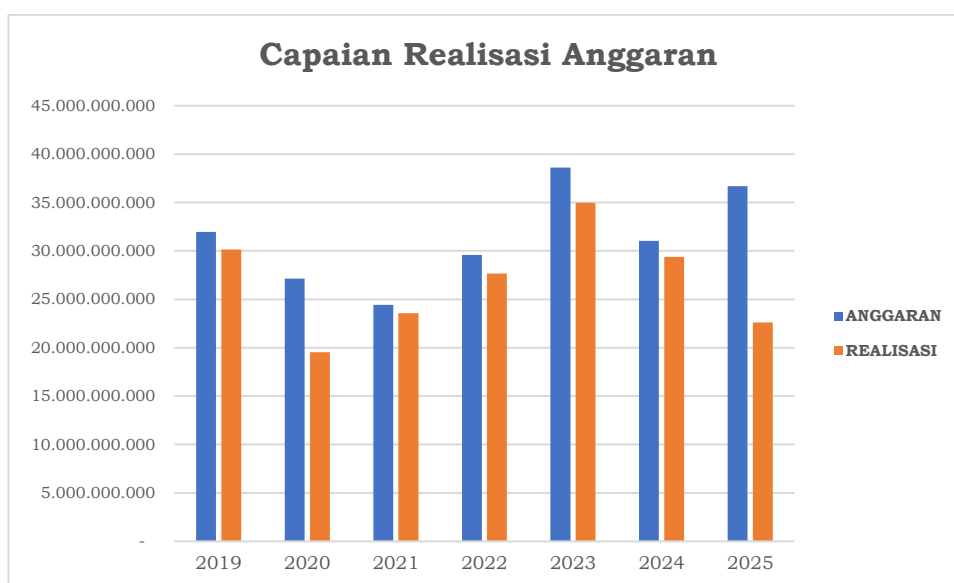
Tabel 2.6 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	2019	31.963.017.738,04	30.143.621.548,00	94,31
2	2020	27.146.304.359,11	19.525.480.052,00	71,93
3	2021	24.436.727.963,00	23.565.685.982,00	96,44
4	2022	29.593.319.612,00	27.677.781.591,00	93,53
5	2023	38.601.156.524,00	34.967.807.187,00	90,59
6	2024	31.023.274.744,00	29.384.482.327,00	94,72
7	2025	36.674.733.370,00	22.615.639.555,00	61,67

Realisasi Tahun 2025 sampai dengan 15 September 2025

Sumber : Sub Bagian Keuangan Kecamatan Cicendo

Grafik 2.3 Grafik Capaian Realisasi Anggaran



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, anggaran Kecamatan Cicendo pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 terjadi Bencana Dunia Covid-19 yang mengakibatkan penurunan disetiap aspek kehidupan. Lalu pada tahun 2023 anggaran Kecamatan Cicendo mulai kembali meningkat dimana bencana Covid-19 sudah mulai menghilang sehingga roda perekonomian sudah mulai kembali membaik. Adapun capaian realisasi secara rata-rata Kecamatan Cicendo mencapai di nilai >90%.

Serta sarana dan prasarana pendukung seperti bangunan Gedung kantor Kecamatan dan Kelurahan, peralatan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masih belum cukup memadai meningkatkan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kecamatan Cicendo.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Cicendo dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Perekonomian Masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi Kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat seperti pembinaan UKM dan Koperasi dan pembinaan/sosialisasi peluang usaha.
2. Pelayanan peningkatan kualitas hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan
3. Pelayanan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat seperti pemeliharaan jalan lingkungan, buruan sae, peningkatan ODF, fasilitasi pengelolaan sampah,dll.
4. Pelayanan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban dengan Pembinaan dan Pelatihan Satgaslinmas, Satkamling Aktif dan Satlinmas Aktif
5. Pelayanan pemerintahan umum dilaksanakan dengan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum.
6. Pelayanan umum kepada masyarakat dengan Pelayanan Prima.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Kota Bandung selama 5 (lima) Tahun ke belakang

RENSTRA TAHUN 2025-2029

terbagi menjadi 2 (dasar) perhitungan kinerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 yang berdasarkan pada RPJMD Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Capaian IKU Kecamatan Cicendo Tahun 2020-2023

No	Sasaran	Indikator	Satu An	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Tar get	Reali sasi	Tar Get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cicendo	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	n/a	n/a	81,6	81,6	81,65	81,65	81,70	81,70
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Cicendo	Persentase Siskamling RW Aktif	%	n/a	n/a	69,64	69,64	71,43	71,43	73,21	76,79
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Nilai	85,84	85,84	85,85	85,85	85,86	85,86	85,87	85,96

Tahun 2020-2023

Pada tahun 2024, Kecamatan Cicendo telah melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan yang terdiri dari 3 program utama yang didukung oleh 7 kegiatan dan 1 program penunjang yang meliputi 6 kegiatan, dengan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 31.023.274.744 dan realisasi sebesar Rp 29.384.482.327 atau 94,72 %. Berikut pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Tahun 2024 yang berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.8 Capaian IKU Kecamatan Cicendo Tahun 2024 Berdasarkan RPD 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	2024			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cicendo	Nilai	88	88,30	100,34	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Unggul	%	100	100	100	
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Berdaya	%	83,33	100	100	
4	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Siskamling RW Aktif	%	66,67	100	149,99	

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun, Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Namun tentu saja dalam pencapaian tersebut masih terdapat ruang-ruang yang diperlukan untuk perbaikan, karena kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan demi tercapainya kepuasan Masyarakat, meningkatnya kepercayaan Masyarakat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun capaian indikator kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung dalam kurun waktu 2020-2024 terdapat 5 sasaran dimana dalam setiap tahunnya memungkinkan untuk terjadi perubahan sasaran sesuai dengan bagaimana hasil reuiu Renstra pada tahun tersebut, sasaran pada capaian kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung digambarkan dalam beberapa indikator, dapat dilihat lebih rinci pada uraian berikut:

Tabel 2.9 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo <i>Sumber: Data Survey Kepuasan Masyarakat</i>	Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	85,84					85,84						100				
2	Persentase Kelurahan Unggul <i>Sumber: Daftar Kriteria Kelurahan unggul yang sudah tercapai</i>	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	50	50	100	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul <i>Sumber: Data Kriteria LKK unggul yang sudah tercapai</i>	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	81,70					81,70					100				
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo <i>Sumber: Data Survey Kepuasan Masyarakat</i>	Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		85,85	85,86	85,87	88		85,85	85,86	85,87	88,30		100	100	100	100,34

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul <i>Sumber: Data Kriteria LKK unggul yang sudah tercapai</i>	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan		81,6	81,65	81,70			81,6	81,65	81,70			100	100	100	
6	Persentase Siskamling RW aktif	Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	73,21	69,64	71,43	73,21		73,21	69,64	71,43	73,21		100	100	100	100	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja	NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Persentase Kelurahan Berdaya <i>Sumber: Daftar Kriteria Kelurahan berdaya yang sudah tercapai</i>	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan					100					100					100
8	Persentase Satlinmas Aktif	Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat					66,67					100					133.3

Tabel 2.10 Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cicendo Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Tahun 2020-2024													
Sasaran Strategis RJMD	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020-2024					Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Cicendo					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	85,84						85,84				
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo		85,85	85,86	85,87	88		85,85	85,86	85,87	88,30	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Unggul (Kecamatan Cicendo)	50	50	100	100	100	50	50	100	100	100	100
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cicendo	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	81,70						81,70				
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis,	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga		81,6	81,65	81,70			81,6	81,65	81,70		

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis Tahun 2020-2024												
Sasaran Strategis RJMD	Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020-2024					Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Cicendo				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
berkualitas dan berdaya saing	Kecamatan Cicendo	Kemasyarakatan Unggul										
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan Berdaya					100					100
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Siskamling RW Aktif	73,21	69,64	71,43	73,21		73,21	69,64	71,43	73,21	
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas aktif					66,67					100

Tahun 2020-2024

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 2.11 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cicendo Kota Bandung

URAIAN	ANGGARAN TAHUN KE-					RALISASI TAHUN KE-					RASIO TAHUN KE-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	14.872.373.349,91					10.697.228.813,47					73,89					1,85	-1,61
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo		13.387.904.920,99	16.212.995.040,16	21.148.028.253,45	16.996.410.208,41		12.910.695.891,96	15.163.548.447,45	19.157.461.613,68	16.098.581.452,56		94,3	90,8	91,1	96,91		
Persentase Kelurahan Unggul (Kecamatan Cicendo)	5.225.663.589,13	4.704.070.132,88	5.696.714.025,31	7.430.722.630,87	5.971.980.388,22	3.758.654.910,01	4.536.394.551,54	5.327.972.956,27	6.731.302.883,50	5.656.512.847,95	71,16	91,25	95,38	90,4	93,64		
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	5.198.154.017,75					3.738.868.143,45					70,36						
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul		4.679.306.396,96	5.666.724.693,16	7.391.604.920,53			4.512.513.513,73	5.299.924.795,52	6.695.867.143,33			98,73	92,92	86,19			
Persentase Kelurahan Berdaya					5.940.541.965,53					5.626.735.715,70					93,7		
Persentase Siskamling RW Aktif	1.850.113.402,31	1.665.446.512,17	2.016.885.853,37	2.630.800.719,14		1.330.728.185,06	1.606.082.024,77	1.886.335.391,75	2.383.175.546,49		74,31	93,26	90,28	90,91			
Persentase Satlinmas aktif					2.114.342.181,84					2.002.652.878,79					95,04		

2.1.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cicendo Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020-2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Berdasarkan tabel 2.5 di atas untuk tahun 2024, terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Satlinmas Aktif (Kecamatan Cicendo), Kecamatan Cicendo dengan capaian kinerja 100.34% dan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo dengan capaian kinerja 100.08%.
- b. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Persentase Kelurahan Berdaya (Kecamatan Cicendo) dengan capaian kinerja 100% dan indikator Persentase Kelurahan Unggul (Kecamatan Cicendo) dengan capaian kinerja 100%.

2.1.3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Secara umum Kecamatan Cicendo Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam untuk tahun 2020-2024. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2020-2024 sebanyak 4 sasaran. Tahun 2024 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cicendo, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas harus dievaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja perlu dilakukan juga analisis dengan pembandingan-pembandingan diantaranya sebagai berikut:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja yang terdiri dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 di Kecamatan Cicendo Kota Bandung, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Capaian kinerja nyata indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo" adalah sebesar 88.03 dari target sebesar 88 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.34 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator 4 "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo" tahun ini adalah sebesar 100,34%.

Capaian kinerja nyata indikator "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo" adalah sebesar 88.03 dari target sebesar 88 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.34 %, capaian ini memenuhi target yang diperjanjikan pada Tahun 2024.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan
3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Cicendo

Faktor Penghambat:

Kendala pelayanan di Kecamatan Cicendo masih belum optimal. Penyebabnya adalah sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana.

Solusi:

Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Cicendo sudah terlihat. Hal ini dilihat dari adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan solusinya.

2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu “Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Cicendo” adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun ke 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator 1 “Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Cicendo” tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cicendo maka capaian kinerjanya mencapai 100.00%.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Unggul Kecamatan Cicendo disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

Faktor pendukung kinerja sehingga Kecamatan Cicendo mampu mencapai angka target adalah Kelembagaan pemerintah yang tepat, aturan (sistem) yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment, dan lingkungan pemerintahan yang sehat.

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya pemahaman dalam hal pengorganisasian dan pelaporan kegiatan, serta
2. Kurangnya Koordinasi antara stake holder terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung kelurahan unggul.

Solusi:

1. Pembinaan kepada Lembaga Kesmasayarakatan dalam rangka mendukung kelurahan unggul baik tingkat kelurahan maupun kecamatan dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan;
2. Kesadaran aparatur dalam pelaksanaan kelurahan unggul di lingkungan Kecamatan Cicendo sudah terlihat. Hal ini dilihat dari adanya evaluasi dan pembinaan secara rutin sehingga aparatur mengetahui tugas yang harus dikerjakan. Bahkan dengan adanya evaluasi tersebut, aparatur termotivasi untuk melakukan

pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan setiap permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat ditemukan solusinya.

3. Berkoordinasi secara aktif dengan SKPD terkait dalam pemenuhan kriteria kelurahan unggul.

3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cicendo

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Cicendo" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 5, capaian kinerja indikator 3 "Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Cicendo" tahun ini adalah sebesar 100%.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja Persentase Kelurahan Berdaya Kecamatan Cicendo disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung:

1. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Cicendo
2. Perencanaan sudah sebagian terpilah dalam sub kegiatan.

Faktor Penghambat:

1. Data mikro kewilayahan belum diperbarui secara berkala sehingga perencanaan kegiatan belum optimal; dan
2. Terbatasnya anggaran dalam mengakomodir setiap permasalahan yang ada.

Solusi:

1. Melakukan pemahaman bersama terkait kriteria dan pemahaman istilah yang terkait dengan perencanaan.
2. Meningkatkan koordinasi antara pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan pemerintah Kelurahan guna menyamakan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

4. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cicendo

Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Cicendo dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu "Persentase siskamling RW Aktif Kecamatan Cicendo" adalah sebesar 100 dari target sebesar 66.67 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 149,99%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Target kinerja nyata indikator "Persentase siskamling RW Aktif (Kecamatan Cicendo)" tahunan meningkat 1.79 Persen dari capaian tahun sebelumnya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja Persentase siskamling RW Aktif Kecamatan Cicendo disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendukung

1. Pemanfaatan anggaran dengan baik guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada DPA;
2. Menjalankan secara optimal program dan kegiatan yang sudah terarah dari RPD sampai dengan PK dan PK perubahan Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Faktor Penghambat

Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Cicendo masih belum optimal. Penyebabnya adalah sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana.

Solusi

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan Siskamling Aktif;
2. Mengadakan Sosialisasi melalui rapat rembukan warga ataupun melalui media elektronik dan pamflet tentang pentingnya Siskamling;
3. Melaksanakan monitoring secara rutin oleh petugas Kelurahan dan Kecamatan dalam pelaksanaan Siskamling.

Dalam menunjang tercapainya capaian tujuan Kecamatan Cicendo terdapat 5 bidang urusan yang saling berkaitan dan harus dipenuhi dalam kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Kesekretariatan

Bidang urusan kesekretariatan di Kecamatan Cicendo berfungsi sebagai pusat pengelolaan administrasi pemerintahan, tata usaha, serta pelayanan internal organisasi. Kinerja pada bidang ini tercermin melalui pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penyusunan laporan, hingga penyediaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung proses pengambilan kebijakan. Selain itu, kesekretariatan juga menjalankan fungsi pengelolaan kepegawaian, keuangan, serta penyediaan sarana prasarana penunjang kerja aparatur kecamatan, sehingga keberlangsungan pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, bidang kesekretariatan memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi dan komunikasi antar-unit kerja di lingkungan kecamatan. Melalui penerapan sistem administrasi yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi informasi, kesekretariatan berkontribusi dalam mempercepat proses pelayanan internal maupun eksternal. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja kesekretariatan Kecamatan Cicendo tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi rutin, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem kerja yang tertata, kesekretariatan berperan sebagai penggerak utama dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan di Kecamatan Cicendo. Adapun data kepegawaian serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12 Data Kepegawaian

NO	URAIAN	ASN Struktural	Fungsional Umum	PPPK	NON ASN	JUM LAH	(KEBUTUHAN PEGAWAI)
1	Kecamatan Cicendo	8	6	2	9	25	(30)
2	Kelurahan Husein Sastranegara	5	1		2	8	(9)
3	Kelurahan Arjuna	4	1		2	7	(9)
4	Kelurahan Pajajaran	4	1		2	7	(9)
5	Kelurahan Pasirkaliki	4	1		2	7	(9)
6	Kelurahan Pamoyanan	5	1		2	8	(9)
7	Kelurahan Sukaraja	4	1		2	7	(9)
JUMLAH		34	12	2	21	71	(84)

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Cicendo per Agustus 2025

Tabel tersebut menggambarkan kondisi kepegawaian di Kecamatan Cicendo beserta kelurahan yang ada di wilayahnya per Agustus 2025. Secara keseluruhan, jumlah pegawai yang ada terdiri dari 34 orang ASN Struktural, 12 orang Fungsional Umum, 2 orang PPPK, serta 21 orang Non ASN. Dengan demikian, total pegawai yang bertugas di Kecamatan Cicendo berjumlah 71 orang, sementara kebutuhan ideal pegawai diproyeksikan sebanyak 84 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai sebesar 13 orang untuk mencapai jumlah formasi yang ideal.

Tabel 2.13 Data Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan Pemanfaatan
1	Gedung Bangunan	1	Baik, perlu perluasan lahan parkir	Digunakan sebagai kantor Kecamatan Cicendo.
2	Ruang Kerja ASN	12	Baik	Digunakan sebagai ruang kerja pejabat struktural dan staf administrasi.
3	Ruang Rapat	3	Cukup	Dimanfaatkan untuk rapat internal, koordinasi lintas perangkat daerah, dan kegiatan sosialisasi.
4	Komputer/Laptop	25	Sebagian Baik, sebagian	Digunakan untuk menunjang pekerjaan administrasi, pelayanan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan Pemanfaatan
			perlu peremajaan	publik, serta pengolahan data.
5	Mesin Printer/Scanner	10	Cukup	Dipakai dalam pengolahan dokumen, surat-menyurat, serta pelayanan administrasi masyarakat.
6	Jaringan Internet	1 paket	Kurang Memadai	Menunjang akses data dan aplikasi layanan pemerintahan, namun masih sering mengalami gangguan.
7	Meja dan Kursi Kerja	40 set	Baik	Digunakan sebagai fasilitas utama pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
8	Arsip dan Lemari Penyimpanan	15	Cukup	Digunakan untuk menyimpan dokumen penting, namun keterbatasan kapasitas masih menjadi kendala.
9	Kendaraan Dinas Operasional	21	Cukup	Digunakan untuk mendukung mobilitas kegiatan dinas, terutama koordinasi ke kelurahan.

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Cicendo 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Cicendo secara umum sudah dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kesekretariatan. Keberadaan ruang kerja, ruang rapat, serta perangkat kerja seperti komputer dan printer, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran proses administrasi, penyusunan laporan, hingga koordinasi internal maupun eksternal. Namun demikian, sebagian fasilitas masih memerlukan perbaikan atau peremajaan, khususnya perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang belum optimal sehingga dapat menghambat efektivitas kerja pegawai.

Selain itu, sarana penyimpanan dokumen seperti lemari arsip masih terbatas sehingga menimbulkan kendala dalam pengelolaan administrasi jangka panjang. Kendaraan dinas juga perlu perhatian lebih untuk memastikan kesiapan mobilitas pelayanan dan koordinasi dengan kelurahan di wilayah Kecamatan Cicendo. Dengan demikian, meskipun sarana dan prasarana yang tersedia relatif memadai, peningkatan kualitas dan kuantitas masih diperlukan guna mendukung terciptanya pelayanan

publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.14 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2025

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	2019	31.963.017.738	30.143.621.548	94,31
2	2020	27.146.304.359	19.525.480.052	71,93
3	2021	24.436.727.963	23.565.685.982	96,44
4	2022	29.593.319.612	27.677.781.591	93,53
5	2023	38.601.156.524	34.967.807.187	90,59
6	2024	31.023.274.744	29.384.482.327	94,72
7	2025	36.674.733.370	22.615.639.555	61,67

Realisasi Tahun 2025 sampai dengan 15 September 2025

Sumber : Sub Bagian Keuangan Kecamatan Cicendo

Berdasarkan data realisasi anggaran Kecamatan Cicendo pada periode tahun 2019 sampai dengan 15 September 2025, terlihat adanya fluktuasi capaian kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, dari total anggaran sebesar Rp31,96 miliar, realisasi yang dicapai sebesar Rp30,14 miliar atau 94,31%, menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Namun pada tahun 2020, capaian realisasi menurun cukup signifikan menjadi hanya 71,93%, yang diduga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 serta adanya refocusing anggaran yang membatasi ruang belanja daerah.

Memasuki tahun 2021 hingga 2024, capaian realisasi kembali menunjukkan tren positif. Tahun 2021 berhasil mencapai 96,44%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode ini. Tahun-tahun berikutnya, yaitu 2022, 2023, dan 2024, tetap stabil dengan capaian di atas 90% (masing-masing 93,53%, 90,59%, dan 94,72%). Hal ini menggambarkan perbaikan dalam manajemen keuangan, pengendalian program, serta peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, pada tahun 2025 hingga tanggal 15 September, realisasi anggaran baru mencapai Rp22,61 miliar dari total anggaran Rp36,67 miliar, atau sekitar 61,67%. Angka ini masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, namun mengingat periode pelaksanaan anggaran masih berjalan hingga akhir tahun, terdapat peluang untuk meningkatkan realisasi agar capaian mendekati target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Cicendo memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dengan capaian realisasi anggaran rata-rata di atas 90% pada sebagian besar tahun. Meski demikian, perlu dilakukan upaya optimalisasi percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 agar tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun dan agar target serapan anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Bidang Urusan Pemerintahan

Kinerja bidang urusan pemerintahan di Kecamatan Cicendo dilaksanakan melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembinaan kelembagaan masyarakat, serta fasilitasi koordinasi pembangunan di tingkat kelurahan. Fokus utama bidang ini adalah memastikan terselenggaranya tertib administrasi kependudukan, pelayanan publik yang efektif, serta penguatan mekanisme perencanaan dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

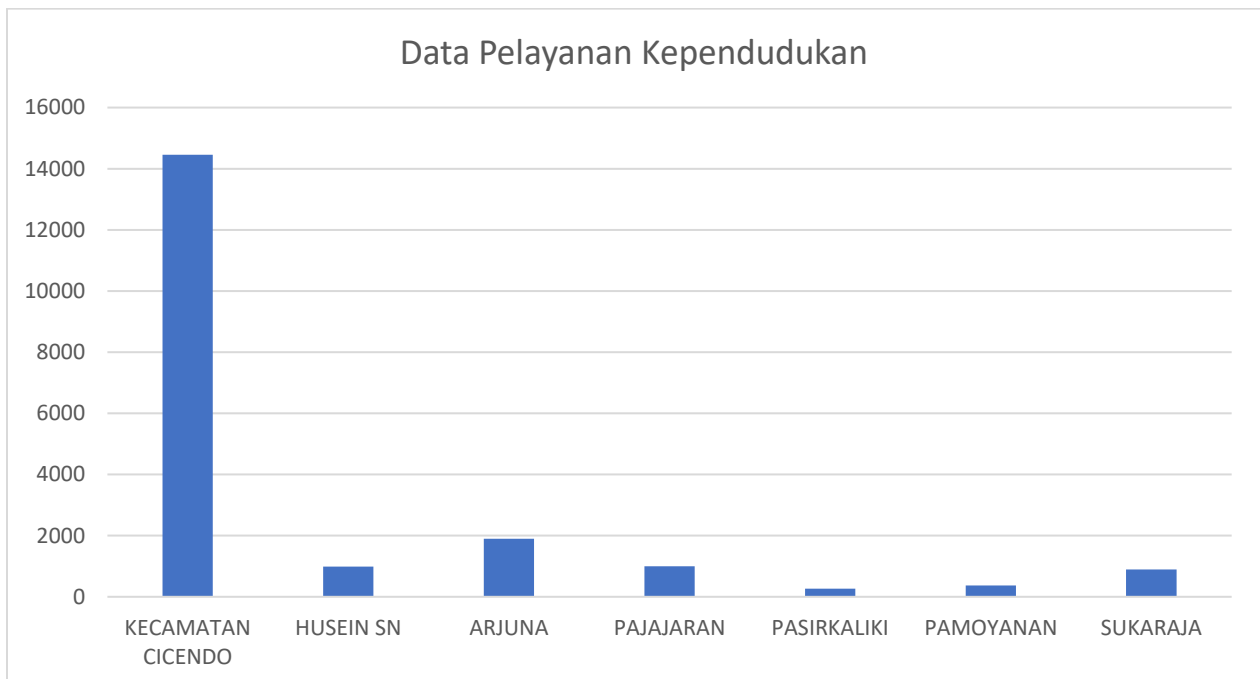
Selanjutnya, kinerja bidang pemerintahan juga ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, serta layanan berbasis teknologi informasi yang mempercepat proses pelayanan dan memperluas aksesibilitas masyarakat. Dalam konteks wilayah Kecamatan Cicendo yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, pelayanan pemerintahan dituntut untuk responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu menjaga ketertiban dan stabilitas sosial di lingkungan kewilayahan.

Selain aspek pelayanan, kinerja urusan pemerintahan juga mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kelurahan, termasuk koordinasi dengan perangkat daerah serta lembaga kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi pembangunan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cicendo. Adapun data pelayanan administrasi kependudukan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
DATA PELAYANAN KEPENDUDUKAN
KECAMATAN CICENDO
TAHUN 2024

UNIT PELAYANAN	KTP	KK	PINDAH		LEGALISIR	SUKET AHLI WARIS	TOTAL PELAYANAN
			DATANG	KELUAR			
KECAMATAN CICENDO	6994	5836	1086	306	101	133	14456
HUSEIN SN	274	337	115	224	29	14	993
ARJUNA	1055	690	67	52	16	20	1900
PAJAJARAN	169	500	91	156	23	59	998
PASIRKALIKI	60	122	26	43		17	268
PAMOYANAN	98	142	47	69	6	11	373
SUKARAJA	305	255	121	132	41	43	897
TOTAL PELAYANAN	8955	7882	1553	982	216	297	19885

Grafik 2.4 Data Pelayanan Kependudukan



Berdasarkan Tabel diatas mengenai Data Pelayanan Kependudukan Kecamatan Cicendo Tahun 2024, terlihat bahwa total pelayanan yang diberikan mencapai **19.885 layanan** dengan rincian terbesar berasal dari pelayanan di tingkat Kecamatan Cicendo sebanyak **14.456 layanan**, kebijakan Disdukcapil yang memperbolehkan masyarakat dapat mengurus langsung administrasi kependudukan ke tingkat Kecamatan atau langsung ke Kantor Dukcapil tanpa harus melampirkan register pengajuan dari Kelurahan sehingga konsentrasi pelayanan lebih banyak ditangani langsung di tingkat kecamatan. Jenis pelayanan yang diberikan

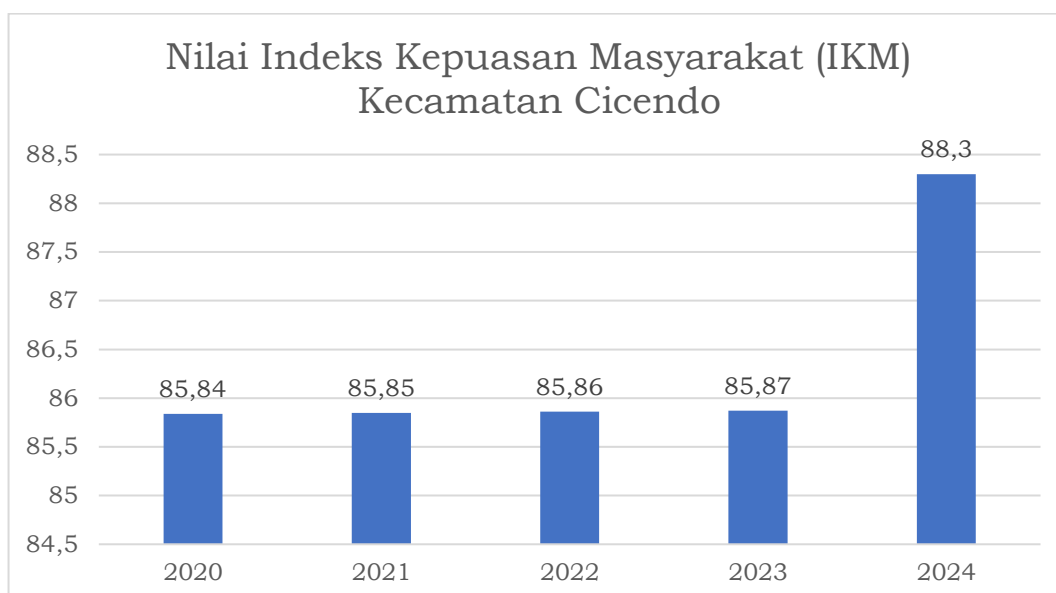
meliputi penerbitan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang dan pindah keluar, legalisir dokumen, serta penerbitan surat keterangan ahli waris.

Adapun tabel survei nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Cicendo selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo			
TAHUN	Target	Realisasi	Persentasi Capaian
2020	85,84	85,84	100
2021	85,85	85,85	100
2022	85,86	85,86	100
2023	85,87	85,87	100
2024	88	88,3	100,34

Grafik 2.5 Capaian Nilai IKM



Berdasarkan data Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo periode tahun 2020 sampai dengan 2024, dapat

diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik secara konsisten mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 hingga 2023, realisasi nilai IKM tercatat stabil pada rentang 85,84 hingga 85,87 dengan persentase capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan berada pada kategori sangat baik serta menunjukkan konsistensi kinerja aparatur dalam mempertahankan standar pelayanan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan, di mana target nilai IKM sebesar 88,00 dapat terlampaui dengan realisasi mencapai 88,30 atau setara dengan 100,34% dari target. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Namun demikian, meskipun nilai IKM menunjukkan tren positif, masih terdapat kendala pada aspek sarana dan prasarana penunjang yang dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung optimalisasi pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas infrastruktur pelayanan agar kualitas layanan publik di Kecamatan Cicendo dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Bidang Urusan Pemberdayaan

Kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cicendo diarahkan pada peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Fokus utama diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat seperti LPM, TP, PKK, Karang Taruna, serta RT dan RW agar mampu berperan optimal dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan di tingkat kewilayahan. Melalui program pembinaan dan fasilitasi, masyarakat didorong untuk lebih berdaya, mandiri, serta berkontribusi aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan melalui dukungan terhadap pengembangan UMKM, pengolahan sampah mandiri, peningkatan ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan dan percepatan pencegahan stunting di kewilayahan, serta pelatihan keterampilan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis potensi wilayah. Upaya ini

diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial, meningkatkan taraf hidup, serta menciptakan kemandirian masyarakat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Cicendo. Adapun data mikro aspek pemberdayaan masyarakat yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Mandiri (RW KBS)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga adalah kegiatan mengolah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.1439-DLH/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Sampah Terpadu di Wilayah Kota Bandung menyebutkan bahwa bahwa pengurangan dan pengolahan sampah dari sumber timbulan khususnya sampah organik belum berjalan secara optimal dikarenakan faktor penyebab utama adalah belum masifnya pemilahan sampah, sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih dekat ke sumber timbulan yaitu penguatan kewilayahan dan aktifitas klaster, agar kinerja pengolahan dan pemanfaatan sampah khususnya organik dapat ditingkatkan dan berkelanjutan.

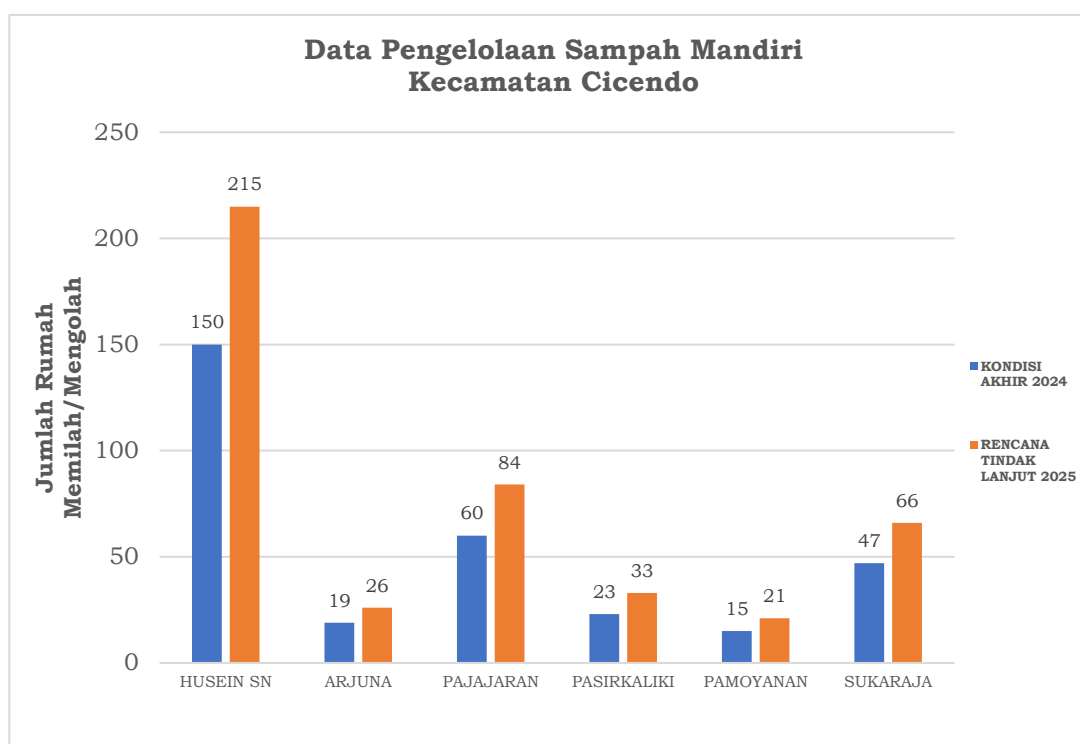
Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dimulai dari pemilahan sampah yang dilakukan di lingkup terkecil yaitu rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup (organik) dan sampah yang bukan dari makhluk hidup (anorganik) untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, seperti pengolahan menjadi pupuk kompos atau daur ulang. Berikut adalah data jumlah

kepala keluarga yang telah melakukan pemilahan sampah di Kecamatan Cicendo:

Tabel 2.17 Data Permasalahan Persampahan

UNIT KERJA	KONDISI AKHIR 2024				RENCANA TINDAK LANJUT 2025			
	RT	RW	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Memilah/Mengolah Sampah	Jumlah RW KBS	Jumlah Rumah Memilah/Mengolah Sampah	Jumlah RW KBS	Peningkatan RW KBS
HUSEIN SN	77	12	329	150	3	215	3	25,00%
ARJUNA	74	8	177	19	1	26	1	12,50%
PAJAJARAN	69	10	266	60	1	84	2	20,00%
PASIRKALIKI	60	10	161	23	1	33	3	30,00%
PAMOYANAN	54	6	117	15	0	21	3	50,00%
SUKARAJA	71	10	226	47	1	66	2	20,00%
TOTAL	405	56	1276	314	7	445	14	25,00%

Grafik 2.6 Data Pengelolaan Sampah Mandiri



Bersasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat akhir permasalahan persampahan di Kecamatan Cicendo pada tahun 2024 serta rencana tindak lanjut untuk tahun 2025. Berdasarkan data, jumlah rumah yang ada di 6 (enam) kelurahan tercatat sebanyak 1.276 unit, dengan 314 rumah di antaranya telah melakukan kegiatan pemilahan atau pengolahan sampah. Selain itu, terdapat 7 RW yang sudah berstatus sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS). Namun demikian, angka tersebut

masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo.

Sebagai tindak lanjut pada tahun 2025, Kecamatan Cicendo menargetkan peningkatan jumlah rumah tangga yang melakukan pemilahan atau pengolahan sampah menjadi 445 KK, serta peningkatan jumlah RW Kawasan Bebas Sampah menjadi 14 RW. Peningkatan ini diharapkan dapat mencapai rata-rata 25% dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, dengan variasi capaian antar kelurahan. Misalnya, Kelurahan Pamoyanan ditargetkan mampu meningkatkan RW KBS hingga 50%, sementara kelurahan lain seperti Arjuna hanya mencapai peningkatan 12,5%. Hal ini menunjukkan adanya upaya terstruktur dan bertahap dalam mengatasi permasalahan persampahan, meskipun secara umum masih diperlukan penguatan sarana, prasarana, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)

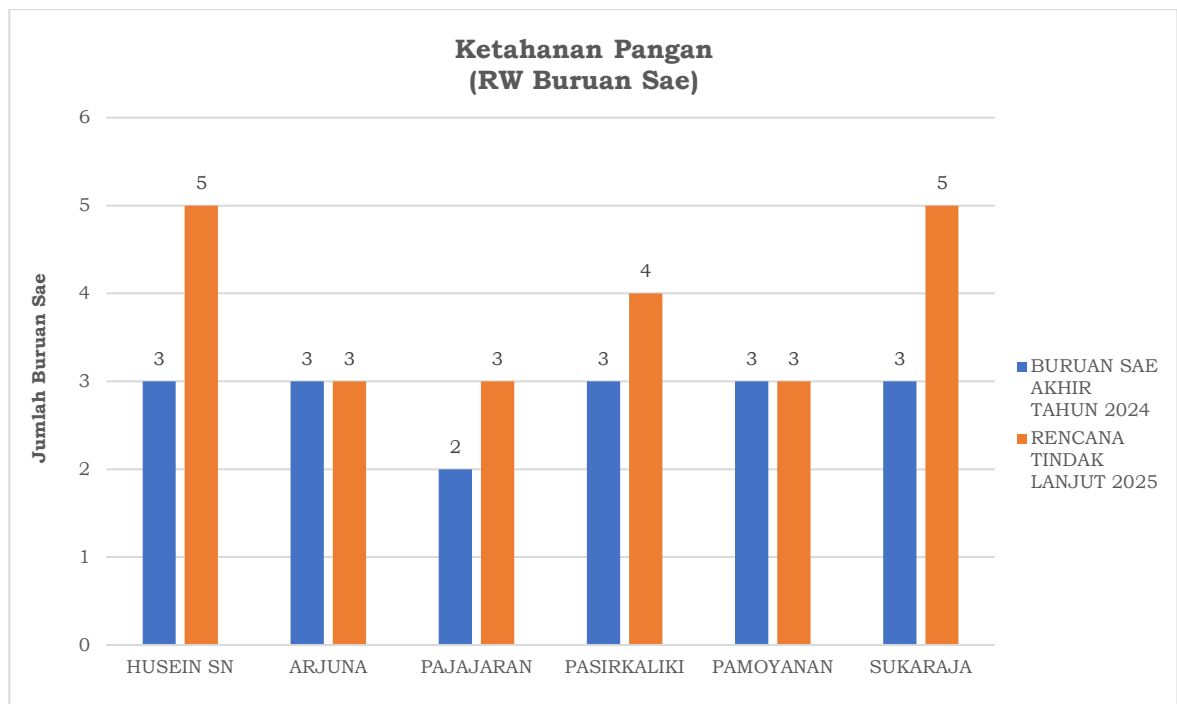
Buruan Sae merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat dan asri dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang tersedia. Idealnya Buruan Sae harus berada di setiap RW yang ada di setiap Kelurahan, namun pada kenyataannya tidak semua RW memiliki Buruan Sae yang keberadaannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga.

Berikut data ketersediaan Buruan Sae di wilayah Kecamatan Cicendo:

Tabel 2.18 Data Permasalahan Ketahanan Pangan

UNIT KERJA	RW	BURUAN SAE AKHIR TAHUN 2024			TINDAK LANJUT 2025		
		Jml Buruan Sae Aktif	Jml Buruan Sae Tidak Aktif	Total Buruan Sae	Jml Buruan Sae Tahun 2025	Peningkatan/Pengurangan	Persentasi
HUSEIN SN	12	3	0	3	5	2	41,67%
ARJUNA	8	3	0	3	3	0	37,50%
PAJAJARAN	10	2	0	2	3	1	30,00%
PASIRKALIKI	10	2	1	3	4	1	10,00%
PAMOYANAN	6	2	1	3	3	0	50,00%
SUKARAJA	10	2	1	3	5	2	50,00%
TOTAL	56	14	3	17	23	6	35,71%

Grafik 2. 7 Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)



Berdasarkan tabel dan grafik data diatas menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Kecamatan Cicendo melalui program *Buruan Sae* pada akhir tahun 2024 serta rencana tindak lanjut tahun 2025. Berdasarkan hasil pendataan, dari total 56 RW yang ada, tercatat 14 RW memiliki Buruan Sae aktif dan 3 RW dengan Buruan Sae tidak aktif, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 17 RW. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan melalui Buruan Sae belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, mengingat baru sekitar 30% dari total RW yang memiliki kegiatan serupa.

Untuk tahun 2025, Kecamatan Cicendo menargetkan peningkatan jumlah RW Buruan Sae menjadi 23 RW, atau bertambah 6 RW baru dengan tingkat peningkatan rata-rata sebesar 35,71%. Peningkatan ini bervariasi di setiap kelurahan, di mana Kelurahan Pamoyanan dan Sukaraja ditargetkan mencapai peningkatan tertinggi sebesar 50%, sementara Pasirkaliki relatif rendah yakni hanya 10%. Melalui rencana ini, pemerintah kecamatan berupaya memperluas cakupan program Buruan Sae guna memperkuat ketahanan pangan keluarga, menyediakan sumber pangan sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan maupun lahan terbatas untuk bercocok tanam.

Dengan demikian, program ketahanan pangan berbasis Buruan Sae tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya

peningkatan kualitas lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cicendo. Namun, untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berkelanjutan berupa fasilitasi sarana, pendampingan teknis, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar keberlanjutan program dapat terjamin.

3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Kecamatan memiliki peran penting dalam kesehatan masyarakat, terutama dalam hal koordinasi, fasilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan merupakan koordinator dan fasilitator berbagai kegiatan kesehatan di tingkat lokal, juga melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

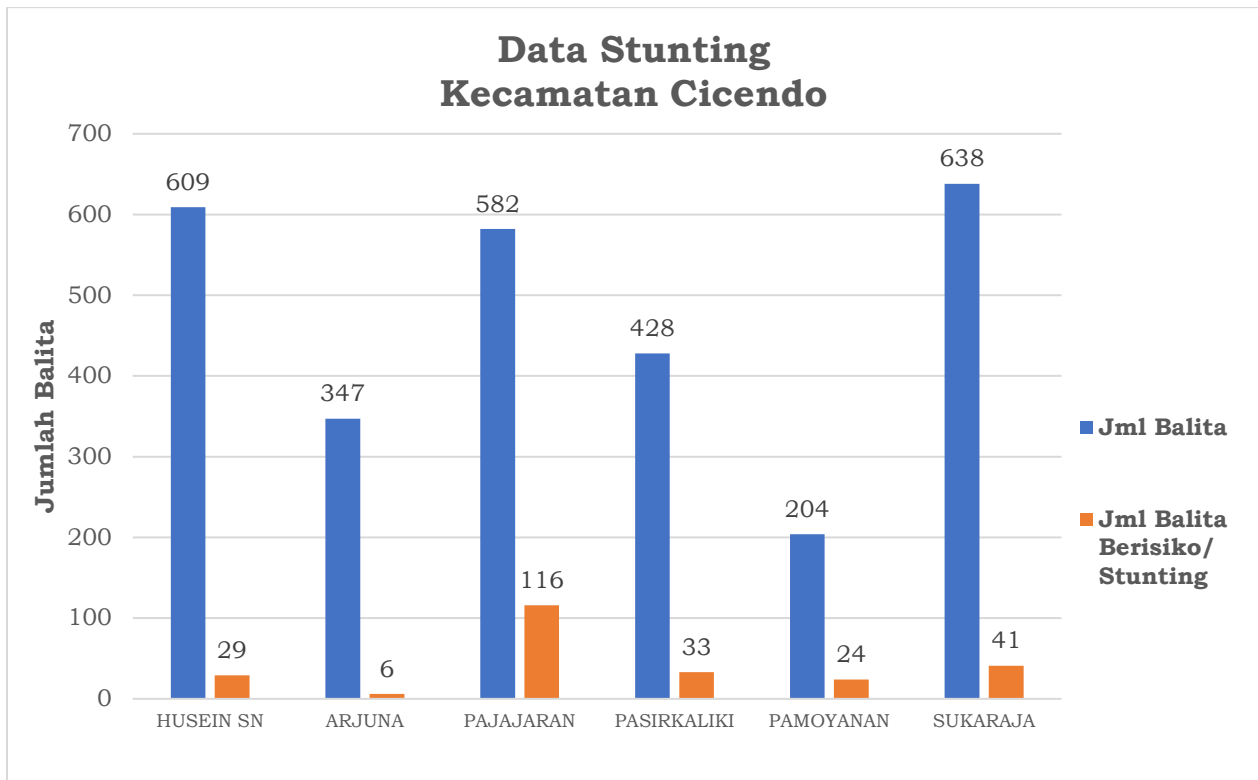
Dalam penanganan stunting, isu utama yang tengah menjadi sorotan adalah tingginya nilai prevalensi stunting pada balita di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang layak. Sedangkan Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting.

Berikut adalah data stunting di lingkungan Kecamatan Cicendo:

Tabel 2.19 Data Stunting

UNIT KERJA	Kependudukan				Jml Balita Berisiko/ Stunting	Persentasi Tingkat Penduduk Stunting
	RT	RW	Jml KK	Jml Balita		
HUSEIN SN	77	12	4583	609	29	0,81%
ARJUNA	74	8	3.554	347	6	0,17%
PAJAJARAN	69	10	7333	582	116	1,66%
PASIRKALIKI	60	10	3223	428	33	1,02%
PAMOYANAN	54	6	2.345	204	24	1,19%
SUKARAJA	71	10	6.535	638	41	0,63%
TOTAL	405	56	27573	2808	249	0,90%

Grafik 2.8 Percepatan Pencegahan Stunting



Berdasarkan data kependudukan, jumlah balita di Kecamatan Cicendo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.808 anak. Dari jumlah tersebut, terdapat 249 balita yang masuk dalam kategori berisiko atau mengalami stunting, sehingga tingkat prevalensi stunting di wilayah ini mencapai 0,90%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum prevalensi stunting relatif rendah, upaya pencegahan dan penanganan tetap menjadi prioritas penting mengingat stunting berdampak langsung terhadap kualitas tumbuh kembang anak serta masa depan generasi mendatang.

Jika dilihat per kelurahan, kasus stunting tertinggi terdapat di Kelurahan Pajajaran dengan jumlah 116 balita (1,66%), disusul oleh Pasirkaliki dengan 33 balita (1,02%) dan Pamoyanan sebanyak 24 balita (1,19%). Sementara itu, Kelurahan Arjuna mencatatkan jumlah kasus terendah yakni 6 balita (0,17%). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi kondisi sosial, ekonomi, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam hal gizi dan kesehatan anak.

Melalui data tersebut, Kecamatan Cicendo dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat program pencegahan stunting, khususnya pada kelurahan dengan angka prevalensi yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan edukasi gizi bagi keluarga, perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak, serta dukungan sarana prasarana posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan di tingkat RW

dan kelurahan. Dengan intervensi yang terarah dan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan angka stunting di Kecamatan Cicendo dapat terus ditekan menuju target nasional penurunan stunting.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Pemukiman (Penyediaan Infrastruktur Dasar)

Tabel 2.20 Sarana Dan Prasarana Kondisi Rusak

- **Drainase**

UNIT KERJA	Data Drainase Rusak			
	Alamat (Lokasi)	Panjang Drainase	Kondisi (Rusak Ringan/Berat)	Panjang Drainase Rusak
HUSEIN SN	-	-	-	-
ARJUNA	Jl. Kresna	400m1	Ringan	400m1
	Jl. Bima Utara	300m1	Ringan	300m1
PAJAJARAN	Jl. Cipedes II	22m	Ringan	22m
PAMOYANAN	Jl. Dursasana	100m	Berat	100m
	Jl. Astina	300m	Berat	300m
	Jl. Baladewa	114m	Berat	300m
	Jl. Pajajaran	100m	Ringan	100m
SUKARAJA	Jl. Gn Batu Rt 04 RW 01	0,50 M x 100 M	Berat	0,50 M x 100 M
	Gg. Karya 2 RT 07 RW 01	48 M	Berat	48 M
SUKARAJA	Jl. Bbk. Cianjur RW 02	L 50cm-P 50M	Sedang	L 50cm-P 50M
	RT 11 RW 02	L 20cm-P 65M	Sedang	L 20cm-P 65M
	Jl. Gn. Batu RT 07 RW 02	L 50cm-P 100M	Sedang	L 50cm-P 100M
	Gg. Budhi 5 RT 04 RW 03	60 M	Ringan	60 M
	Gg. Budhi 7 RT 05 RW 03	50 M	Ringan	50 M
	Gg. Budhi 5 RT 06 RW 03	175 M	Ringan	175 M
	Gg. Budhi 8 RT 08 RW 03	80 M	Ringan	80 M
	RT 04 RW 04	100 M	Ringan	100 M
	Gg. H. Kosim RT 06 RW 04	300 M	Ringan	300 M
	RT 01 RW 06	60 M	Ringan	60 M
	RT 03 RW 06	35 M	Ringan	35 M
	JL. Babakan Radio RT 04 RW 07	60 M	Ringan	60 M
	JL. Babakan Radio RT 07 RW 07	150 M	Ringan	150 M
	JL. H. Hambali RT 05 RW 07	100 M	Ringan	100 M
	Gg Sopandi RT 02 RW 10	55 M	Ringan	55 M
	Gg. Sawo RT 03 & RT 04 RW 10	221 M	Ringan	221 M
Jl. Raden Ganda II RT 05 RW 10	RT 01 / RW 06	60	ringan	60
	RT 02 / RW 06	40	ringan	40
	RT 03 / RW 06	50	ringan	50

Dengan ringkasan diantaranya:

- Rusak Ringan : ±16 lokasi;
- Rusak Sedang : 3 lokasi
(Jl. Bbk. Cianjur RW 02, Gn. Batu RT 07/RW 02); dan
- Rusak Berat : 2 lokasi
(Gn. Batu RT 04 RW 01, Gg. Karya 2 RT 07 RW 01).

• **Jalan Pemukiman**

UNIT KERJA	Data Jalan Rusak			
	Alamat (Lokasi)	Panjang Jalan	Kondisi (Rusak Ringan/ Berat)	Panjang Jalan Rusak
HUSEIN SN	Jl Jatayu Gang Ibu Dioh RT.01 RW.06	93 M	Ringan	93 M
ARJUNA	Jl. Karang Tengah Barat RT.03 RW.07	400 M	Ringan	400 M
	Gg. Saleh RT.05 RW.06	300 M	Ringan	300 M
PAJAJARAN	Jl. Cipedes	50m	Ringan	50m
	Jl. Suparmin	75m	Ringan	75m
	Jl. Pajajaran Blk	100m	Ringan	25m
	Jl. Sukawarna Gg. III	200m	Ringan	75m
PASIRKALIKI	Jl. Somawinata	192,47 m	Berat	35 m
	Jl. Musaen	187 m	Berat	25 m
PAMOYANAN	Jl.Sukabakti	300m	Ringan	70m
	Jl. Pandu Dalam	100m	Ringan	100m
	Jl. Hamid	100m	Ringan	174m
	Jl. Mahmud	100m	Ringan	140m
SUKARAJA	Gg. Karya 4 RT 01 RW 01	15 M	Ringan	15
	Gg. Karya RT 03 RW 01	30 M	Ringan	30 M
	Gg. Hj. Juariah RT 04 RW 01	100 M	Ringan	100 M
	Jl. Ajuariah Rt 04 RW 01	1,5 L, P 150M	Ringan	1,5 L, P 150M
	Jl, Gn Batu Rt 04 RW 01	0,50 M x 100 M	Ringan	0,50 M x 100 M
	Perbatasan RT 5 & RT 3 RW 01	60 M	Ringan	60 M
	Gg. Karya 2 RT 08 RW 01	20M	Ringan	20M
	Gg. Karya III	90M	Ringan	30M
	Gg. Karya IV	70M	Ringan	15M
	Gg. Karya I	100M	Ringan	
	Gg. Cikahuripan RT 03, 05, 06 RW 02	350 M	Ringan	350 M
	Gg. Madsulhi RT 10 RW 02	65 M	Ringan	65 M
	Gg. Asy-Syukur RT 04 RW 02	150 M	Ringan	150 M
	Jl. Budi RT 01 RW 03	200 x 2M	Sedang	200 x 2M
	Gg. Budhi 5 RT 04 RW 03	100 M	Sedang	100 M
	Gg. Budhi 8 RT 08 RW 03	150 M	Sedang	150 M
Jl. Budhi RT 01 RW 04	210 M	Ringan	210 M	
Gg. Hj. Kosim RT 03 RW 04	250 M	Ringan	250 M	
Gg. Hj. Kosim RT 03 RW 04	200 M	Ringan	200 M	
Gg. Budhi Bakti 1 RT 05 RW 04	72 M	Ringan	72 M	
Gg. Budhi Bakti 2 RT 05 RW 04	88 M	Ringan	88 M	
Gg. H. Kosim RT 06 RW 04	P 300 M, L 120 CM	Ringan	P 300 M, L 120 CM	
Jl. Mega Sari RW 05	100 X 4 M	Ringan	100 X 4 M	

UNIT KERJA	Data Jalan Rusak			
	Alamat (Lokasi)	Panjang Jalan	Kondisi (Rusak Ringan/ Berat)	Panjang Jalan Rusak
	Jl. Mega Murn RT 05 RW 05	100 X 4 M	Ringan	100 X 4 M
	Jl. Mega Murni RW 05	100 X 4 M	Ringan	100 X 4 M
	Jl. Mega indah RW 05	100 X 4 M	Ringan	100 X 4 M
	Jl. Mega ayu RW 05	50 X 4 M	Ringan	50 X 4 M
SUKARAJA	Jl. H.Hambali RT 01 RW 07	255 M	Ringan	255 M
	Jl. H. Amsor RT 02 RW 07	600 M	Ringan	600 M
	Jl. Pancuran 7 RT 03 RW 07	200 M	Ringan	200 M
	Gg. Bapak Hasan RT 03 RW 07	150 M	Ringan	150 M
	Jl. Mega Raya 3 RT 04 RW 07	1000 M	Ringan	1000 M
	Jl. H.Hambali RT 05 RW 07	350 M	Ringan	350 M
	JL. Babakan Radio RT 04 RW 07	60 M	Ringan	60 M
	JL. Babakan Radio RT 07 RW 07	150 M	Ringan	150 M
	JL. H. Hambali RT 05 RW 07	100 M	Ringan	100 M
	Gg Handayani RT 01 RW 10	100 M	Ringan	100 M
	Gg Sopandi RT 02 RW 10	85 M	Ringan	85 M
	Jl. Raden Ganda RT 04 RW 10	221 M	Ringan	221 M
	Jl. Raden Ganda II RT 05 RW 10	40 M	Ringan	40 M
	RT 02 / RW 06	305 M	Ringan	305
	Jl. Mentor samping rumah Bp. Wagiman RT 01/RW05	10 m	Ringan	10 m
	Jl. terusan megasari RT03/RW05	100 m	Ringan	100m
	Gang ema RT03/RW 05	20M	Ringan	20 M
	Gg. Masjid Al-Barokah RT04/RW05	40m	Ringan	40m
	Gg. Bp. Andi RT 04/RW 05	20M	Ringan	20m
	Gg. Depan rumah pa Dadang RT04/RW05	20m	Ringan	20m
	Jl. Mega Murni RT05/RW05	200M	Ringan	200m

Dengan ringkasan diantaranya:

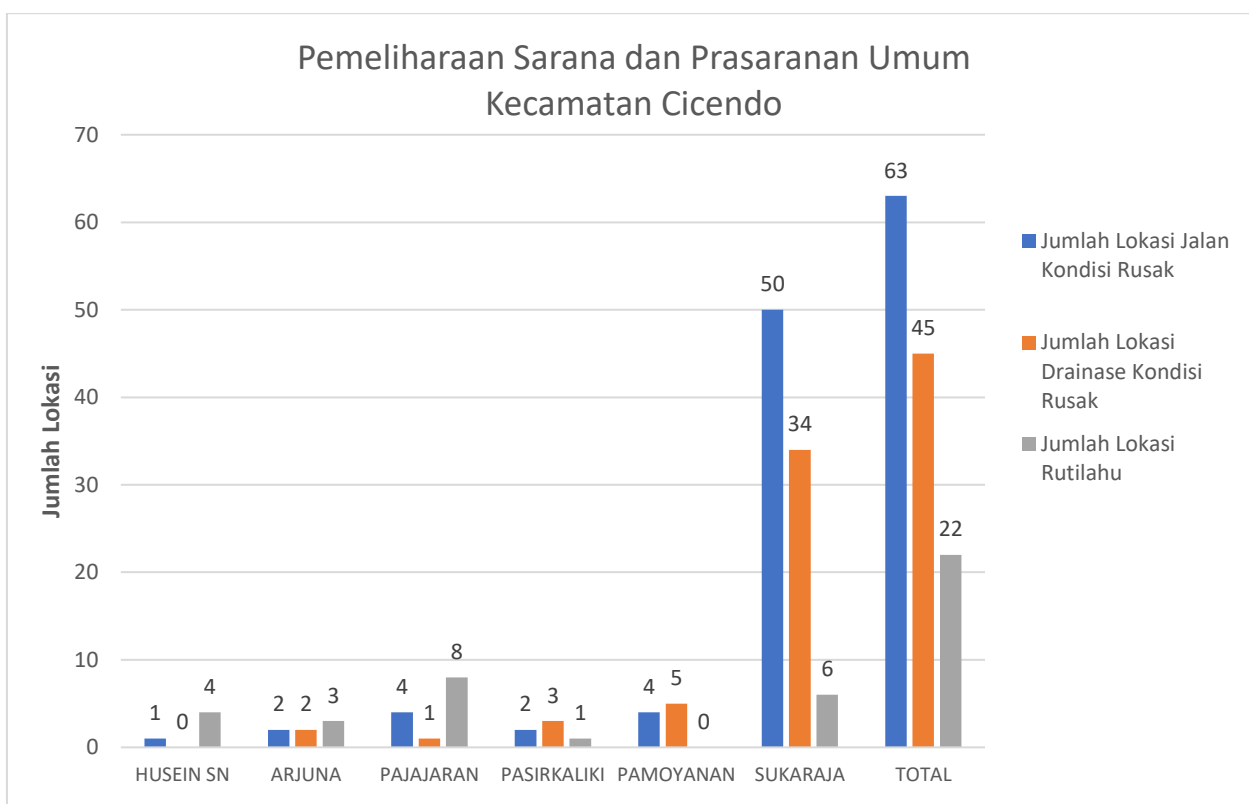
- Rusak Ringan : ±58 lokasi;
- Rusak Sedang : 3 lokasi
(Jl. Budhi, Gg. Budi RW 03 Kel. Sukaraja); dan
- Rusak Berat : 2 lokasi
(Jl. Somawinata dan Jl Musen Kel. Pasirkaliki).

Kecamatan Cicendo sudah berupaya melakukan pemeliharaan dan perbaikan untuk fasilitas umum infrastruktur kewilayahan sehingga berkurangnya titik genangan saat hujan, jalan yang lebih aman dan nyaman dilalui warga, keluhan masyarakat menurun di beberapa lokasi dan dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat umum.

Tabel 2.21 Rekapitulasi Data Sarana Prasarana Kondisi Rusak

UNIT KERJA	Jumlah Lokasi		
	Jalan Kondisi Rusak	Drainase Kondisi Rusak	Rutilahu
HUSEIN SN	1	0	4
ARJUNA	2	2	3
PAJAJARAN	4	1	8
PASIRKALIKI	2	3	1
PAMOYANAN	4	5	0
SUKARAJA	50	34	6
TOTAL	63	45	22

Grafik 2. 9 Sarana dan Prasarana Kondisi Rusak



Tabel dan grafik tersebut menyajikan data mengenai kondisi sarana dan prasarana umum di Kecamatan Cicendo, yang meliputi jumlah lokasi jalan rusak, drainase rusak, serta rumah tidak layak huni (rutilahu). Secara keseluruhan, tercatat terdapat 63 lokasi jalan dengan kondisi rusak, 45 lokasi drainase dalam kondisi rusak, serta 22 unit rutilahu yang membutuhkan penanganan. Data ini mencerminkan masih adanya permasalahan infrastruktur dasar di berbagai kelurahan yang perlu mendapatkan prioritas dalam program pemeliharaan dan perbaikan.

Jika ditinjau per kelurahan, kondisi paling menonjol terdapat di Kelurahan Sukaraja, dengan jumlah 50 lokasi jalan rusak, 34 drainase

rusak, dan 6 unit rutilahu. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelurahan lainnya, sehingga menunjukkan perlunya intervensi lebih intensif di wilayah tersebut. Sementara itu, kelurahan lain seperti Husein Sastranegara, Arjuna, Pajajaran, Pasirkaliki, dan Pamoyanan memiliki jumlah kerusakan yang relatif lebih rendah, namun tetap memerlukan perhatian, khususnya pada aspek perbaikan drainase dan penanganan rutilahu.

Secara umum, data ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan di Kecamatan Cicendo perlu didukung oleh program pemeliharaan infrastruktur yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya perbaikan jalan, normalisasi drainase, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan sarana prasarana pendukung dan alokasi anggaran masih menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi agar target pemeliharaan infrastruktur dapat tercapai secara optimal.

5. Penguatan dan Pengembangan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Berkenaan dengan pembangunan UMKM, pemerintah memiliki peran dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. Dalam dukungannya terhadap UMKM, Kecamatan memiliki peran seperti berikut:

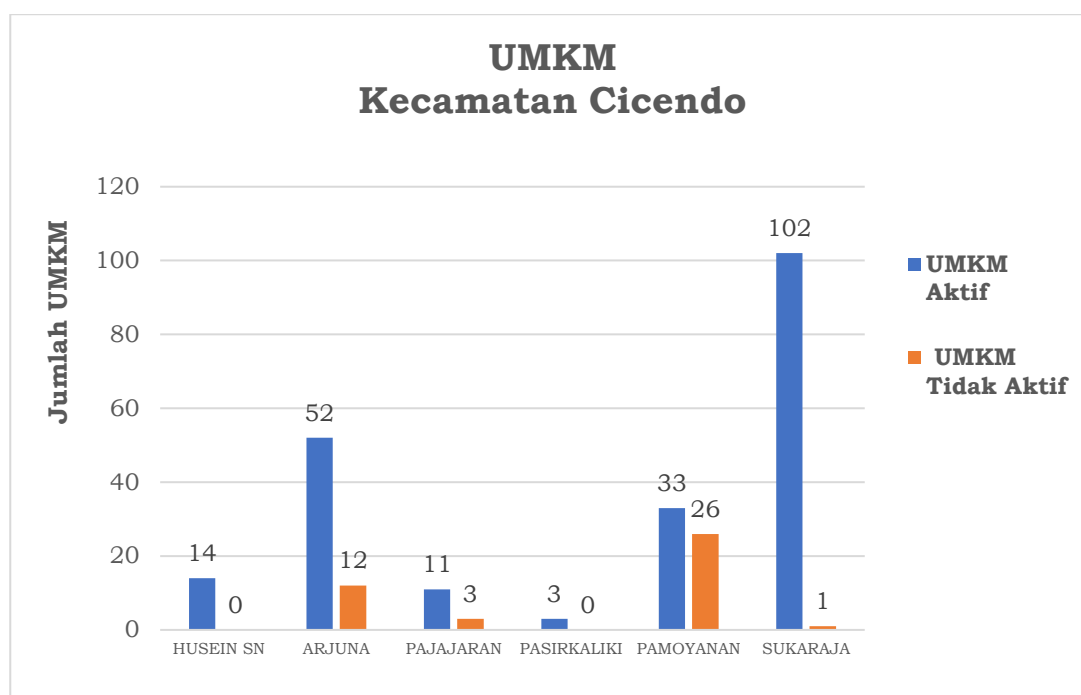
- 1) Pendataan UMKM;
- 2) Penerbitan surat keterangan domisili usaha;
- 3) Rekomendasi pengajuan bantuan modal bagi koperasi dan UMKM;
- 4) Pemberian akses promosi untuk tingkat Kota Bandung, baik melalui keikutsertaan dalam acara pemerintahan maupun dimasukkan dalam E-Katalog dan Sosial Media Pemerintah.

Berikut adalah data dari UMKM yang berada di Kecamatan Cicendo:

Tabel 2.22 Data UMKM

UNIT KERJA	UMKM		
	Jml UMKM Aktif	Jml UMKM Tidak Aktif	Total UMKM
HUSEIN SN	14	0	14
ARJUNA	52	12	64
PAJAJARAN	11	3	14
PASIRKALIKI	3	0	3
PAMOYANAN	33	26	59
SUKARAJA	102	1	103
TOTAL	215	42	257

Grafik 2.10 UMKM Kecamatan Cicendo



Tabel dan grafik tersebut menyajikan gambaran mengenai kondisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cicendo. Berdasarkan data yang dihimpun, secara keseluruhan terdapat 257 UMKM, dengan rincian 215 UMKM yang masih aktif dan 42 UMKM yang tidak aktif.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa UMKM di Kecamatan Cicendo tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat, dengan tingkat keberlangsungan usaha yang cukup tinggi. Namun demikian, keberadaan sejumlah UMKM tidak aktif, khususnya di wilayah Pamoyanan dan Arjuna, menjadi indikator perlunya strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi akses permodalan, penguatan jaringan pemasaran, serta dukungan regulasi yang berpihak pada pengembangan UMKM.

4. Bidang Urusan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

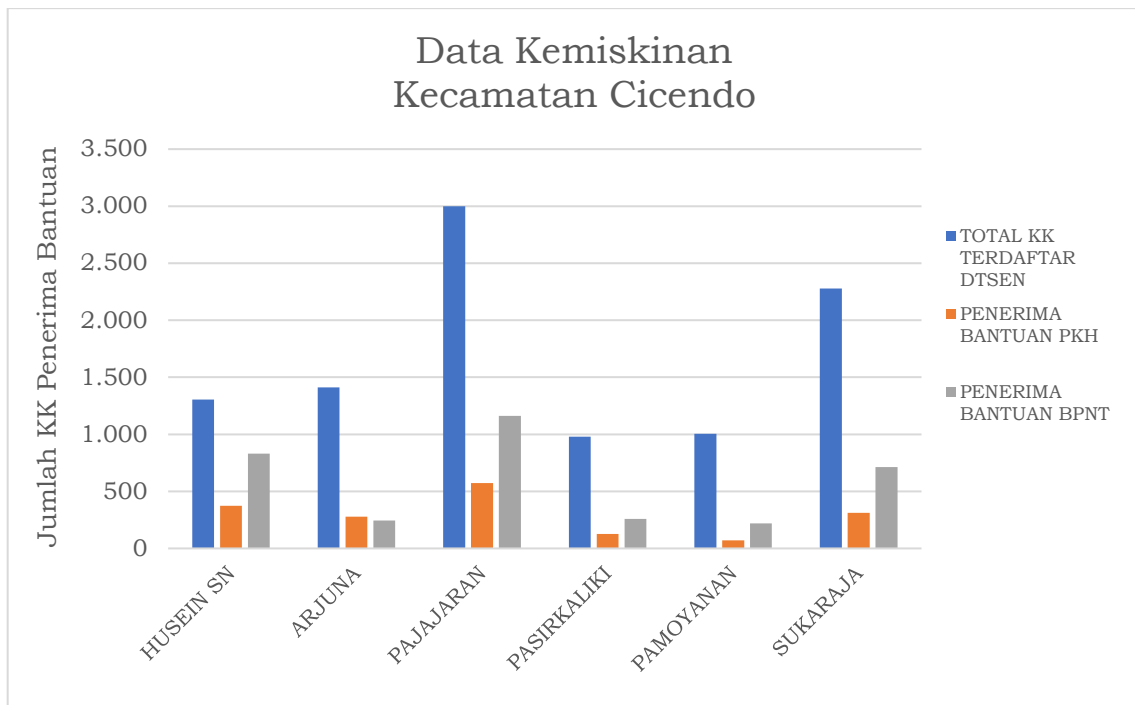
Ada beberapa jenis kemiskinan, seperti kemiskinan absolut (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar), kemiskinan relatif (dibandingkan dengan orang lain), kemiskinan kultural (akibat budaya), dan kemiskinan struktural (akibat sistem sosial).

Pendataan data Kemiskinan dan Sosial Ekonomi terdapat dalam DTSEN. DTSEN merupakan singkatan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional, adalah basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi, yang digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Berikut adalah DTSEN di Kecamatan Cicendo:

Tabel 2.23 Data Kemiskinan Kecamatan Cicendo

UNIT KERJA	Kependudukan				Jumlah Penduduk Pra Sejahtera Berdasarkan Kepala Keluarga (Menurut SIKS-NG/DTSen)				Persentasi Tingkat Kemiskinan
	Jml Penduduk	Jml KK	Luas Wilayah (Dalam Ha)	Tingkat Kepadatan	Penerima PKH	Penerima BPNT	Lainnya (Selain BPNT PKH)	Total	
HUSEIN SN	16.602	4.583	252,69 Ha	65,7 Jiwa/Ha	373	831	100	1.304	28,45%
ARJUNA	16.843	3.554	68 Ha	247,69 Jiwa/Ha	278	246	887	1.411	39,70%
PAJAJARAN	19.919	7.333	73 Ha	272,86 Jiwa/Ha	574	1.163	1.263	3.000	40,91%
PASIRKALIKI	9.621	3.223	109 Ha	88,27 Jiwa/Ha	127	259	594	980	30,41%
PAMOYANAN	7.316	2.345	52 Ha	140,69 Jiwa/Ha	72	219	715	1.006	42,90%
SUKARAJA	20.245	6.535	132 Ha	153,37 Jiwa/Ha	313	712	1.253	2.278	34,86%
TOTAL	90.546	27.573	686,69 Ha	968,58 Jiwa/Ha	1.737	3.430	4.812	9.979	36,19%

Grafik 2.11 Data Kemiskinan Kecamatan Cicendo



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dilihat berdasarkan data jumlah Kepala Keluarga (KK) pra-sejahtera yang terdaftar dalam DTKS/DTsen Kecamatan Cicendo tahun 2025, tercatat total 9.979 KK yang menerima berbagai bentuk bantuan sosial. Kelurahan dengan jumlah penerima DTKS terbanyak adalah Kelurahan Pajajaran dengan 3.000 KK, disusul oleh Kelurahan Sukaraja sebanyak 2.278 KK, serta Kelurahan Arjuna dengan 1.411 KK. Sementara itu, jumlah terendah terdapat di Kelurahan Pamoyanan dengan 1.006 KK, meskipun jika dilihat dari persentasenya terhadap total KK, wilayah ini justru mencatat tingkat kemiskinan yang tertinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kelurahan Pajajaran dan Sukaraja menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Cicendo, mengingat jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggi akan berdampak pada tingginya kebutuhan intervensi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, Kelurahan Pamoyanan meskipun jumlah absolutnya lebih rendah, tetap memerlukan perhatian serius karena persentase tingkat kemiskinannya relatif lebih besar dibandingkan kelurahan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Kecamatan Cicendo tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus berbasis pada kondisi objektif masing-masing kelurahan. Kelurahan dengan jumlah DTKS terbanyak memerlukan

strategi penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja baru, serta fasilitasi akses permodalan. Sedangkan kelurahan dengan persentase kemiskinan tinggi memerlukan program yang lebih menekankan pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi ekonomi keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Cicendo.

5. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

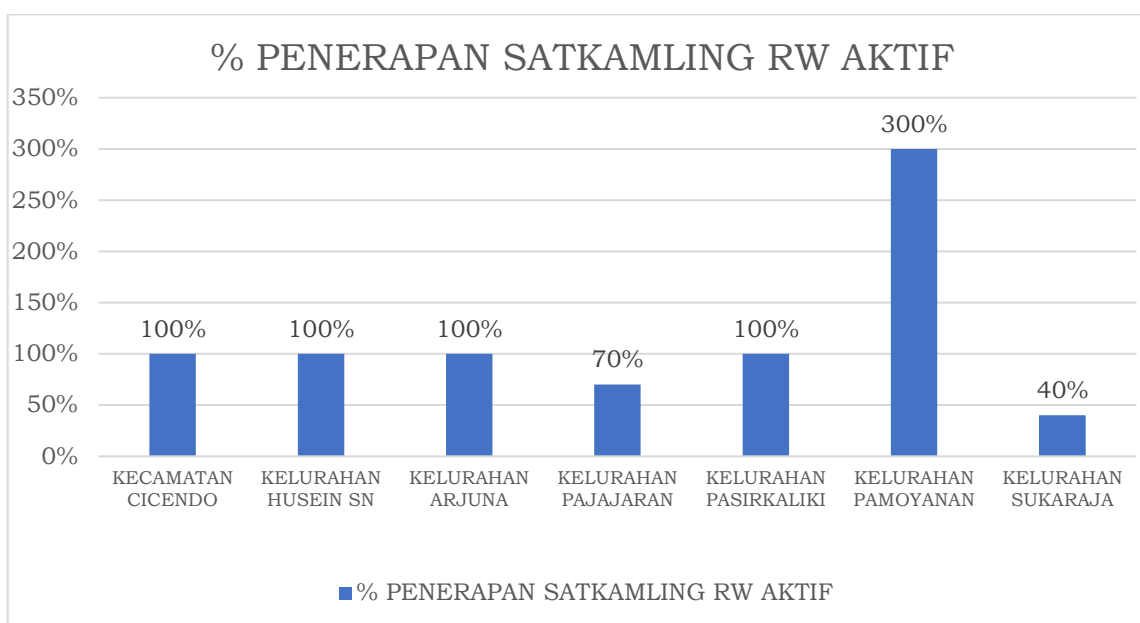
Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cicendo dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, kenyamanan, serta ketertiban masyarakat di wilayah. Kinerja pada bidang ini meliputi pengendalian aktivitas masyarakat di ruang publik, penanganan potensi gangguan ketertiban, serta penegakan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kewilayahan. Selain itu, Kecamatan Cicendo juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kepatuhan hukum, menjaga lingkungan yang kondusif, serta membangun kesadaran kolektif dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, upaya penanganan ketertiban umum difokuskan pada pengendalian permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan keresahan, seperti keberadaan pedagang kaki lima di lokasi yang tidak semestinya, praktik premanisme, dan kurangnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan patroli, sosialisasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, Kecamatan Cicendo berusaha menciptakan ketertiban wilayah yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cicendo diharapkan mampu memperkuat stabilitas sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Adapun Data Satlinmas dan Satkamling Aktif di wilayah Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24 Data Satlinmas dan Satkamling Aktif

NO	UNIT KERJA	JUMLAH RW	SATLINMAS AKTIF		SATKAMLING AKTIF	% PENERAPAN SATKAMLING RW AKTIF
			PETUGAS LINMAS KANTOR	PETUGAS LINMAS RW		
1	KECAMATAN CICENDO		15			100%
2	KELURAHAN HUSEIN SN	12	12	74	12	100%
3	KELURAHAN ARJUNA	8	8	29	8	100%
4	KELURAHAN PAJAJARAN	10	10	18	7	70%
5	KELURAHAN PASIRKALIKI	10	10	20	10	100%
6	KELURAHAN PAMOYANAN	6	6	52	18	300%
7	KELURAHAN SUKARAJA	10	10	74	4	40%
TOTAL			71	267	59	

Grafik 2.12 Grafik Satlinmas dan Satkamling



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Cicendo tercatat sebanyak 71 orang petugas Linmas kantor dan 267 petugas Linmas di tingkat RW. Selain itu, tercatat pula terdapat 59 Satkamling RW aktif yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Data ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya ketertiban umum dan pencegahan potensi gangguan keamanan di wilayah kecamatan.

Dari sisi persentase penerapan Satkamling RW aktif, terlihat adanya variasi antar kelurahan. Kelurahan Husein Sastranegara, Arjuna, dan Pasirkaliki menunjukkan capaian 100% penerapan Satkamling RW aktif, yang menandakan bahwa seluruh RW di wilayah tersebut memiliki sistem keamanan lingkungan yang berjalan dengan baik. Kecamatan Cicendo secara keseluruhan juga mencapai 100%, yang mencerminkan keberhasilan koordinasi di tingkat kecamatan.

Namun demikian, masih terdapat ketimpangan di beberapa wilayah. Kelurahan Pajajaran hanya mencapai 70%, menandakan masih adanya RW yang belum menerapkan Satkamling aktif. Kondisi serupa juga terlihat di Kelurahan Sukaraja yang hanya mencapai 40%, sehingga memerlukan perhatian serius dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebaliknya, Kelurahan Pamoyanan menunjukkan capaian 300%, yang berarti terdapat lebih banyak Satkamling RW aktif dibandingkan jumlah RW yang ada. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam menginisiasi kegiatan keamanan lingkungan, meskipun secara administrasi angkanya melebihi standar.

Secara umum, data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Kecamatan Cicendo telah menunjukkan capaian yang baik dalam pembentukan Satlinmas dan penerapan Satkamling, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan konsistensi penerapan di seluruh kelurahan, terutama di wilayah dengan persentase rendah seperti Sukaraja dan Pajajaran, sekaligus menjaga keberlanjutan di kelurahan dengan capaian tinggi seperti Pamoyanan, Arjuna, dan Husein Sastranegara.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Cicendo sebagai unit pelayanan publik di tingkat wilayah memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan yang cepat, tepat dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelompok sasaran utama dari pelayanan Kecamatan Cicendo mencakup berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan pemerintahan, kependudukan dan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan peta proses bisnis yang dimiliki oleh Kecamatan, berikut adalah kelompok sasaran Layanan dari Kecamatan Cicendo:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat di wilayah Kecamatan Cicendo menjadi sasaran utama dari seluruh area pelayanan publik. Mulai dari layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan pelayanan langsung lainnya.

2. Pelaku Ekonomi Lokal dan UMKM

Pelaku Ekonomi Lokal menjadi salah satu sasaran yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas wilayah.

3. PPKS (Pemerlu Pelayanaan Kesejahteraan Sosial)

PPKS menjadi salah satu sasaran penerima layanan sosial, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi kegiatan penguatan kapasitas

4. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan)

Kecamatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mitra di tengah masyarakat yang disebut sebagai LKK. LKK sendiri terdiri dari RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM, dan Posyandu. Menjadi salah satu sasaran untuk memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan penyampaian informasi kepada warga.

Melalui pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan warga Kecamatan Cicendo berupaya memastikan bahwa seluruh kelompok sasaran dapat mengakses layanan secara adil, transparan dan berkualitas, sejalan dengan prinsip pelayanan prima dan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

2.1.5. Mitra Kecamatan Cicendo

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, Kecamatan Cicendo secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Mitra-mitra yang terlibat berasal dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat, serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dalam mendukung pembangunan kewilayahan.

Mitra yang terlibat di Kecamatan Cicendo turut berperan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cicendo, antara lain pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting, penguatan UMKM, pengelola lingkungan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kapasitas aparatur kewilayan. Bentuk dukungan mitra dapat berupa teknis, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, hingga fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi yang dilakukan bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan menciptakan inovasi yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Kemitraan yang dibangun dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kesejahteraan warga Cicendo. Mitra Kecamatan Cicendo dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan pencapaian target pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Mitra Kecamatan Cicendo dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Percepatan Pencapaian Target Pembangunan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA YANG DIINTERVENSI	Mitra Perangkat Daerah	Uraian / Kriteria Yang Diintervensi
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	Layanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Keliling Mepeling (Pengurusan Pelayanan KK, KTP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian), adanya petugas Disdukcapil yang ditempatkan / diperbantukan di kecamatan dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kependudukan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja yang dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan	BKPSDM	Pemberian TPP berdasarkan laporan realisasi kinerja secara berkala
		Teknologi informasi & komunikasi publik	Diskominfo	Penguatan sistem informasi pelayanan publik kecamatan/kelurahan, Transparansi informasi melalui website/media sosial resmi, dukungan aplikasi layanan, dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Tata kelola Pemerintahan	Bagian Organisasi Setda	pembinaan tata kelola pemerintahan dan kinerja SAKIP kecamatan dan peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
		Administrasi Wilayah dan Kelurahan	Bagian Pemerintahan Setda	Koordinasi urusan pemerintahan dan pembinaan kelurahan
		Membantu dalam proses Pengadaan barang/Jasa sesuai Peraturan (Perpres No 46 tahun 2025)	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Memberikan pedoman, SOP, serta aplikasi e-purchasing/e-procurement agar proses pengadaan lebih tertib, efisien, dan transparan.
2	Persentase Kelurahan UTAMA	Pendampingan regulasi dalam pembinaan tata kelola administrasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap SOP serta peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Memberi arahan terkait pengelolaan anggaran, mencegah potensi fraud atau penyalahgunaan, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pelayanan publik kecamatan/kelurahan, menjembatani penyampaian hasil pengawasan dari kecamatan ke Wali Kota sebagai dasar pengambilan keputusan

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA YANG DIINTERVENSI	Mitra Perangkat Daerah	Uraian / Kriteria Yang Diintervensi
		Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang kan dicapai	BKAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran yang mendukung Kinerja 2. Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKS-SKPD 3. Tersedianya DPA yang telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Kinerja
		Penyusun perencanaan pembangunan daerah, termasuk sinkronisasi program kecamatan dengan prioritas pembangunan kota yang tercantum dalam RKPD, Renstra, Renja	Bapperida	Berperan dalam evaluasi kinerja pembangunan, termasuk memberikan umpan balik atas capaian Nilai SAKIP Kecamatan, dimana akan meningkat jika perencanaan programnya disusun selaras dengan RPJMD/RKPD yang difasilitasi Bapperida serta memastikan bahwa anggaran berbasis kinerja benar-benar efektif
		Menjamin ketahanan pangan, pengembangan pertanian & urban farming	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Koordinasi / Penyuluhan / Pelatihan terkait Ketahanan Pangan (seperti : Pemberian Bibit Tanaman, bibit ikan lele, bibit ayam)
		Penanganan masalah sosial	Dinas Sosial	Koordinasi terkait verifikasi dan pendataan penerima manfaat (BPNT) dan bantuan sosial lainnya
		Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pembangunan keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Adanya PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang bertugas untuk melaksanakan, mengelola dan menggerakkan program kependudukan dan ketahanan keluarga berencana di kecamatan/kelurahan, penyuluhan kesehatan reproduksi, Program Kampung KB di kelurahan, pelayanan KB di Posyandu dan Puskesmas
		Pembinaan koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi pemberdayaan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo
		Pengembangan industri & perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah), Fasilitasi sertifikasi halal/standarisasi produk, promosi produk lokal, penguatan daya saing usaha kecil dan kolaborasi pengadaan Bazar murah
		Fasilitasi perizinan usaha kecil, dukungan investasi lokal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha), izin usaha mikro kecil, izin usaha menengah/besar

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KRITERIA YANG DIINTERVENSI	Mitra Perangkat Daerah	Uraian / Kriteria Yang Diintervensi
		Layanan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	koordinasi teknis intervensi gizi spesifik melalui Puskesmas yang ada di kecamatan, pelatihan kepada kader posyandu, melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dan sosialisasi dan penyediaan sarana pendukung (alat ukur tinggi/berat badan)
		Penataan kawasan permukiman, perumahan layak huni, infrastruktur dasar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB), Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Penyediaan sarana/prasarana dasar (jalan, drainase, MCK, Septictank Komunal)
		Lingkungan dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	Menyediakan dan mengawasi fasilitas persampahan (TPS, armada angkut sampah), Program Bank Sampah dan 3 R (reduce, reuse, recycle)
3	Persentase Satlinmas Aktif	Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi dan kolaborasi dalam penegakan Perda dan Perkada, menindak pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, melaksanakan operasi bersama penertiban PKL, Parkir liar, Reklame liar, operasi miras dan Bangunan tanpa izin, membina dan mengkoordinasikan linmas di tingkat kelurahan, membantu penguatan Pos Kamling

Tabel diatas menggambarkan bentuk kolaborasi antara Kecamatan Cicendo dengan perangkat daerah (PD) dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan. Kolaborasi ini mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ketahanan pangan, sosial, kependudukan, hingga penataan ruang dan ketertiban umum. Setiap perangkat daerah memiliki peran spesifik yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat, baik melalui penyediaan fasilitas, pemberdayaan, maupun pendampingan teknis.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Cicendo, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan, dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Cicendo sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah yang menjadikan Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator, menjadikan ruang gerak kecamatan menjadi lebih sempit; dan
2. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Cicendo.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Cicendo dapat diidentifikasi permasalahan berdasarkan bidang urusan kegiatan di Kecamatan Cicendo, sebagai berikut:

a) Permasalahan Bidang Urusan Kesekretariatan

1. Permasalahan Kekosongan Jabatan (Pegawai)

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya jumlah ASN pada setiap kelurahan. Rata-rata kelurahan hanya memiliki 7 hingga 8 pegawai, padahal kebutuhan ideal ditetapkan sebanyak 9 orang. Kondisi ini dapat berdampak pada beban kerja yang tidak seimbang, di mana pegawai yang tersedia harus merangkap beberapa fungsi pelayanan. Kekurangan tenaga fungsional juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi, pelayanan teknis, serta pengelolaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.

Selain keterbatasan jumlah pegawai, proporsi Non-ASN yang cukup tinggi (21 orang atau sekitar 29,57% dari total pegawai) menunjukkan adanya ketergantungan pada tenaga non-permanen dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan. Hal ini berpotensi menimbulkan kendala dalam kesinambungan pelayanan, mengingat status Non-ASN memiliki keterbatasan dari sisi kapasitas, hak, dan kewajiban formal dibandingkan ASN. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa penataan kebutuhan pegawai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengajuan formasi tambahan ASN untuk mengisi kekosongan yang ada.

2. Permasalahan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor

Masih terdapat sejumlah keterbatasan yang berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan publik serta penyelenggaraan urusan pemerintahan. Gedung kantor Kecamatan Cicendo dalam kondisi baik, namun memerlukan perluasan lahan parkir mengingat keterbatasan area yang tersedia untuk menampung kendaraan pegawai maupun masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta mengganggu kelancaran aktivitas pelayanan.

Ketersediaan sarana pendukung berupa ruang rapat, komputer/laptop, mesin printer/scanner, serta arsip dan lemari penyimpanan masih belum sepenuhnya memadai. Sebagian perangkat komputer memerlukan peremajaan karena keterbatasan usia dan performa, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan pekerjaan administrasi maupun pelayanan publik. Selain itu, kapasitas arsip dan lemari penyimpanan masih terbatas sehingga menyulitkan dalam pengelolaan dokumen penting secara tertib dan berkesinambungan.

Permasalahan yang cukup mendasar adalah pada kondisi bangunan Gedung kantor yang dinilai baik tetapi keterbatasan lahan yang mengakibatkan kurang memadainya lahan parkir dan halaman kantor yang berdampak kenyamanan warga saat menerima pelayanan dan kenyamanan pada saat menerima kunjungan tamu.

b) Permasalahan Bidang Urusan Pemerintahan

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana penunjang pelayanan, termasuk ruang pelayanan yang belum sepenuhnya memadai untuk menampung jumlah warga yang cukup banyak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan;
2. Kondisi Lahan Parkir yang sudah tidak representatif menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan. Keterbatasan tersebut sering menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan, baik dari warga maupun tamu yang berkunjung. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran pelayanan serta citra pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang tertib dan teratur;

3. Belum Optimalnya Penerapan SMM ISO 9001:2015, hal ini dikarenakan implementasi standar mutu tersebut baru mulai diterapkan pada tahun 2025 sehingga masih memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian di berbagai aspek, baik dari sisi regulasi internal, prosedur kerja, maupun budaya organisasi; dan
4. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Aparatur, khususnya dalam hal penyusunan dokumen mutu, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan. Keterbatasan pemahaman ini berpotensi menghambat konsistensi penerapan sistem, sehingga hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan utama peningkatan kualitas pelayanan public.

c) Permasalahan Bidang Urusan Pemberdayaan

Bidang urusan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung, tetapi juga mencakup aspek koordinasi, keberlanjutan program, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Secara umum, permasalahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat perlu diidentifikasi secara komprehensif agar dapat dirumuskan langkah strategis yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program pemberdayaan benar-benar memberikan dampak positif, baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun terhadap penguatan kelembagaan sosial di wilayah Kecamatan Cicendo. Adapun permasalahan yang menjadi fokus program kegiatan strategis di kecamatan cicendo diantaranya:

1. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS)

Dari tabel 2.14 diketahui bahwa masing-masing Kelurahan telah memiliki tempat untuk pengolahan sampah baik organik, anorganik, maupun residu. Namun ketersediaan tersebut masih

memiliki hambatan dalam pelaksanaannya sehingga belum berjalan secara optimal, hal tersebut di antaranya adalah:

- Tempat pengolahan sampah tidak ada di setiap lingkungan RW sehingga masih sulit dijangkau oleh warga di RW lainnya;
- Lokasi tempat pengolahan sampah berada di fasos fasum yang peruntukannya untuk kebutuhan lain (seperti jalan lingkungan untuk warga) sehingga harus direlokasi;
- Lokasi tempat pengolahan sampah kurang memadai sehingga proses pengolahan sampah tidak berjalan optimal;
- Kurangnya sampah organik sebagai bahan makanan bagi maggot (Rumah Maggot);
- Banyaknya hama seperti tikus dan burung yang seringkali merusak dan/atau memakan maggot (Rumah Maggot);
- Kurangnya sarana dan prasarana pada tempat pengolahan sampah, seperti Mesin Pencacah yang rusak, kurangnya gerobak sampah untuk mengangkut sampah yang telah terpilah ke lokasi pengolahan sampah, kurangnya bahan bakar minyak sebagai bahan bakar mesin pencacah, kurangnya wadah untuk menyimpan sampah organik dari warga, dll;
- Kurangnya sarana dan prasana untuk pemilahan sampah di lingkungan masyarakat, seperti misalnya tempat sampah terpilah yang masih minim tersedia;
- Banyaknya pengepul barang rongsok sehingga Bank Sampah tidak dapat memaksimalkan potensinya;
- Kurang banyaknya petugas pengangkut sampah untuk memaksimalkan pemilahan sampah di rumah tangga;
- Masih disatukannya sampah yang telah dipilah warga oleh petugas pengangkut sampah karena kekurangan sarana dan prasarana, dan kurangnya pemahaman terkait pemilahan sampah;
- Kurangnya ritasi pengangkutan sampah residu oleh DLH pada TPS yang seringkali mengakibatkan penumpukan sampah di TPS;

- Lokasi TPS yang berada di pinggir jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan situasi lingkungan yang tidak tertata.

2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae)

- Rendahnya Partisipasi Masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program Buruan SAE masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga yang aktif berpartisipasi masih terbatas, sehingga dampak yang diharapkan terhadap peningkatan ketahanan pangan belum tercapai secara maksimal. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya program ini menjadi faktor utama yang perlu mendapat perhatian.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pegiat Buruan SAE. Ketersediaan SDM yang secara khusus menjadi penggerak program Buruan SAE masih sangat terbatas. Pegiat yang ada belum merata di seluruh RW, sehingga kegiatan pengembangan urban farming tidak berjalan konsisten. Kekurangan SDM ini berpotensi memperlambat akselerasi program dan menghambat target peningkatan jumlah RW Buruan SAE.
- Kurangnya Pemahaman dan Edukasi untuk Pegiat Buruan SAE. Edukasi dan pelatihan teknis terkait urban farming, pengelolaan lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian perkotaan masih belum optimal. Hal ini berdampak pada kurangnya keterampilan pegiat dalam mengelola lahan yang terbatas agar tetap produktif dan berkelanjutan. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan sering kali tidak konsisten dan kurang menghasilkan manfaat optimal.
- Keterbatasan Lahan. Keterbatasan lahan di wilayah Kecamatan Cicendo menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan Buruan SAE. Kondisi lingkungan perkotaan yang padat permukiman menyebabkan sulitnya penyediaan lahan khusus untuk kegiatan urban farming. Hal ini membatasi ruang gerak program sehingga hanya dapat dijalankan di beberapa lokasi yang memiliki ketersediaan lahan.

- Kurangnya Pendampingan dari Dinas Terkait. Koordinasi dan pendampingan teknis dari dinas atau instansi terkait masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pendampingan mengakibatkan pegiat Buruan SAE kurang memperoleh arahan, inovasi, serta dukungan teknis yang berkesinambungan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya perkembangan program serta belum tercapainya standar keberhasilan yang diharapkan.

3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

- Kurangnya Literasi dan Penerapan Ilmu Parenting. Salah satu faktor utama penyebab stunting adalah rendahnya literasi serta penerapan ilmu parenting yang dimiliki oleh sebagian ibu. Pengetahuan mengenai pola asuh, pemberian nutrisi yang tepat, serta stimulasi tumbuh kembang anak masih terbatas. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya perkembangan balita, meskipun akses terhadap layanan kesehatan sudah tersedia.
- Kurangnya Pemeriksaan Rutin pada Balita. Kegiatan pemeriksaan rutin secara berkala pada balita masih belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam mengetahui kondisi gizi maupun perkembangan anak. Minimnya kesadaran orang tua untuk melakukan pemantauan kesehatan balita secara teratur memperbesar risiko terjadinya stunting.
- Kurangnya Pendeteksian Dini pada Ibu Hamil. Upaya pencegahan stunting melalui pendeteksian dini terhadap ibu hamil masih belum maksimal. Padahal, intervensi pada masa kehamilan sangat krusial untuk memastikan kesehatan janin dan mencegah risiko stunting sejak dini. Keterbatasan edukasi, kesadaran, serta cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menjadi kendala utama.
- Masih Adanya Kepercayaan pada Tradisi Lama. Sebagian masyarakat masih memegang kepercayaan atau tradisi lama yang kurang sesuai dengan prinsip kesehatan modern, khususnya terkait pola asuh dan pemberian nutrisi. Tradisi ini sering kali bertentangan dengan praktik medis yang

dianjurkan, sehingga dapat memengaruhi kualitas tumbuh kembang balita dan menghambat upaya pencegahan stunting.

- Kurangnya Dukungan Keluarga dan Masyarakat. Pemantauan tumbuh kembang balita tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Namun, keterlibatan keluarga maupun lingkungan dalam mendukung pola asuh sehat masih rendah, sehingga beban utama hanya ditanggung oleh ibu. Kondisi ini menyebabkan kurangnya keberlanjutan dalam pemantauan perkembangan anak.
- Kurangnya Pendampingan dari Dinas Terkait. Pendampingan intensif dari dinas atau instansi terkait masih perlu ditingkatkan, baik dalam bentuk edukasi, monitoring, maupun penyediaan sarana pendukung kesehatan ibu dan anak. Minimnya pendampingan mengakibatkan kurangnya arahan teknis dan keberlanjutan program, sehingga upaya percepatan penurunan angka stunting belum berjalan secara maksimal.

4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan Pemukiman (Penyediaan Infrastruktur Dasar)

Permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Kelurahan Sukaraja (merupakan salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius, kondisi ini disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi drainase serta penyempitan badan sungai yang melewati kawasan tersebut.

Penyempitan aliran air mengakibatkan berkurangnya kapasitas tampung, sehingga pada saat curah hujan tinggi, air meluap dan menimbulkan genangan maupun banjir di pemukiman warga. Keadaan ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian material maupun ancaman kesehatan masyarakat akibat lingkungan yang tergenang.

Selain faktor teknis, permasalahan dalam aspek kewenangan administrasi wilayah. Letak geografis Kelurahan Sukaraja yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi menjadikan penanganan

banjir kerap terkendala koordinasi lintas daerah, Perbedaan kewenangan antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan drainase serta normalisasi sungai menyebabkan upaya penanganan belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada lambatnya implementasi solusi permanen, sehingga masyarakat masih terus menghadapi risiko banjir yang berulang.

Permasalahan banjir di kawasan Perempatan Jalan Pajajaran dan Pasirkaliki merupakan salah satu isu krusial yang mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan fungsi wilayah sebagai pusat perekonomian serta pergerakan lalu lintas. Tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menjadi faktor utama yang memperbesar risiko banjir, terutama karena kondisi infrastruktur drainase di kawasan tersebut belum terpelihara dengan baik. Drainase yang mengalami kerusakan maupun penumpukan sedimentasi mengakibatkan kapasitas alirannya semakin berkurang, sehingga air tidak dapat tersalurkan secara optimal dan meluap ke jalan raya.

Selain faktor teknis, kondisi banjir semakin diperparah oleh minimnya area resapan air di wilayah perkotaan yang padat bangunan. Kurangnya ruang terbuka hijau dan dominasi lahan terbangun mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga seluruh limpasan air langsung menuju ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Di sisi lain, perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air turut memperburuk keadaan. Sampah yang menumpuk di drainase menyebabkan tersumbatnya aliran, sehingga mempercepat terjadinya genangan bahkan banjir di saat hujan dengan intensitas tinggi.

Dengan demikian, banjir di Perempatan Pajajaran–Pasirkaliki tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur drainase yang kurang terawat, sedimentasi yang menumpuk, minimnya daerah resapan air, serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Permasalahan ini memerlukan penanganan terpadu baik dari sisi teknis, pengelolaan tata ruang, maupun peningkatan kesadaran

masyarakat agar permasalahan banjir dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Faktor penyebab permasalahan Jalan rusak atau tidak terpelihara di Kecamatan Cicendo adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya permukaan jalan yang cepat rusak karena genangan air hujan;
- b. Banyaknya pekerjaan pengaspalan yang kurang tebal sehingga menjadi mudah terkikis dan berlubang;
- c. Adanya pembongkaran jalan karena proyek penggalian (seperti penggalian kabel dan PDAM);
- d. Belum semua wilayah terlayani pembangunan jalan karna keterbatasan anggaran;
- e. Beberapa RT/RW belum aktif mengusulkan pembangunan jalan lingkungan;
- f. Belum adanya SK pelimpahan kepemilikan jalan untuk menjadi fasilitas social dan fasilitas umum.

Adapun dampak yang ditimbulkan permasalahan jalan rusak dan drainase rusak adalah sebagai berikut:

- Dampak permasalahan jalan rusak
 1. Menurunnya Kelancaran Mobilitas Masyarakat
 2. Meningkatnya Risiko Kecelakaan Lalu Lintas
 3. Terganggunya Distribusi Barang dan Jasa
 4. Meningkatnya Biaya Perawatan Kendaraan
 5. Turunnya Citra dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
 - Dampak permasalahan drainase rusak
 1. Meningkatnya Risiko Banjir dan Genangan Air
 2. Kerusakan pada Infrastruktur Lain
 3. Terganggunya Kesehatan Masyarakat
 4. Penurunan Kualitas Lingkungan
 5. Terganggunya Aktivitas Ekonomi dan Sosial
 6. Meningkatnya Beban Anggaran Pemerintah
5. Penguatan dan Pengembangan UMKM
- Produk UMKM Kurang Beragam. Sebagian besar pelaku UMKM di wilayah Kecamatan masih berfokus pada produk makanan, sehingga kurang adanya variasi produk yang

dapat membuka peluang pasar lebih luas. Minimnya diversifikasi produk berdampak pada keterbatasan potensi pengembangan usaha dan daya tarik konsumen.

- Permasalahan Modal Usaha. Keterbatasan modal usaha menjadi kendala utama bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi, maupun memperluas jaringan pemasaran. Akses terhadap lembaga keuangan formal juga masih dirasakan sulit oleh sebagian pelaku usaha.
- Kesulitan Mendapatkan PIRT. Sebagian UMKM mengalami kendala dalam memperoleh Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai salah satu syarat legalitas produk makanan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman prosedur, keterbatasan informasi, maupun terbatasnya pendampingan dari pihak terkait.
- Pemasaran Produk Masih Terbatas. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran konvensional, sehingga jangkauan konsumen relatif kecil. Belum optimalnya pemanfaatan platform digital turut membatasi daya jangkau pemasaran.
- Keterbatasan Pelatihan Wirausaha. Program pelatihan wirausaha yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas manajerial, inovasi produk, maupun keterampilan pemasaran digital bagi pelaku UMKM. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.
- Kurangnya Dukungan Pemasaran dari Pemerintah maupun Swasta. Dukungan dalam bentuk promosi, fasilitasi pameran, maupun kerja sama dengan pihak swasta masih terbatas. Akibatnya, UMKM belum mendapatkan kesempatan optimal untuk memperluas pangsa pasar secara berkelanjutan.
- Daya Saing di Era Digital Masih Rendah. Perkembangan teknologi digital menuntut UMKM untuk adaptif dalam pemasaran, promosi, dan transaksi online. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan

teknologi digital secara efektif, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun sarana pendukung.

d) Bidang Urusan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis kemiskinan, seperti kemiskinan absolut (tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar), kemiskinan relatif (dibandingkan dengan orang lain), kemiskinan kultural (akibat budaya), dan kemiskinan struktural (akibat sistem sosial).

Permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Cicendo diantaranya:

1. Banyaknya Masyarakat dengan pendapatan rendah dikarenakan berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sehingga kesejahteraannya masih kurang;
2. Banyaknya Masyarakat dengan Pendidikan dan Keterampilan rendah;
3. Banyaknya Masyarakat yang Tinggal di rumah tak layak;
4. Banyaknya Masyarakat yang Tidak mendapatkan akses layanan Kesehatan;
5. Banyaknya Masyarakat yang Tidak memiliki BPJS dengan biaya pribadi;
6. Banyaknya Masyarakat yang ketergantungan bantuan pemerintah;
7. Banyaknya Masyarakat yang Kurang mendapatkan pelatihan dan pembinaan;
8. Banyaknya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dikarenakan banyak warga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan tapi masih terdata di DTESN. Namun sebaliknya, banyak warga miskin yang belum masuk ke DTESN dikarenakan kurangnya pemahaman warga dalam proses pendataan.

9. Tumpang tindih program bantuan karena data DTESN tidak selalu sinkron antara Perangkat Daerah ataupun Lembaga lain (seperti BPJS, Dinsos, Kemensos);
10. Data warga di DTSEN masih banyak yang tidak sesuai dengan hasil Desil;
11. Data warga di DTSEN belum bisa di filter lebih detail (jadi hanya filter jumlah saja bukan per-BNBA);
12. Belum ada basis data lansia terlantar, disabilitas, anak yatim di tingkat RT/RW;
13. Pemutakhiran data yang kurang valid;
14. Masih adanya dobel penerimaa bantuan PKH dan BPNT;
15. Kuota pengajuan bansos yang terbatas.

e) Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, menciptakan suasana aman, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang terjaga dengan baik menjadi prasyarat utama dalam mendukung kelancaran pembangunan daerah, peningkatan perekonomian, serta harmonisasi kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kecamatan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan praktik pelanggaran hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam melakukan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal ini menuntut adanya langkah strategis dan terukur dari pemerintah kecamatan bersama aparat terkait agar permasalahan dapat diminimalisir serta tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun permasalahan utama dan dampak yang mungkin di timbulkan yang ada di wilayah Kecamatan Cicendo diantaranya seperti:

1. Masih adanya praktik premanisme, baik secara individu maupun kelompok. Praktik premanisme yang dilakukan secara individu maupun berkelompok masih menjadi persoalan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti pungutan liar, intimidasi, maupun penguasaan ruang publik secara tidak sah. Permasalahan ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan serta keterbatasan upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif dan tertib hukum.

Dampak: Kondisi ini berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta menurunkan citra positif wilayah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif;

2. Ketidaktegasaan hukum dan keterbatasan lapangan kerja. Faktor ketidakpastian dalam penegakan hukum serta keterbatasan kesempatan kerja menjadi pemicu tumbuhnya kelompok masyarakat yang kurang produktif dan berperilaku menyimpang. Kelompok ini sering kali mengembangkan pola hidup yang merugikan masyarakat, antara lain melalui tindakan kriminal kecil hingga praktik premanisme yang meresahkan.

Dampak: Apabila dibiarkan, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya angka kriminalitas, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat, serta menurunnya ketertiban umum;

3. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda). Belum optimalnya sosialisasi Peraturan Daerah mengakibatkan sebagian masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka, serta ketentuan yang berlaku dalam menjaga ketertiban. Minimnya pengetahuan tersebut berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran aturan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dampak: Hal ini menimbulkan kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas di lapangan, memicu meningkatnya

pelanggaran, serta melemahkan wibawa peraturan daerah sebagai instrumen hukum daerah;

4. Kurangnya koordinasi antara kewilayahan dan Satpol PP dalam penanganan PKL. Penanganan permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih menghadapi kendala akibat kurangnya sinergi antara perangkat kewilayahan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kondisi ini membuat upaya penataan PKL belum berjalan efektif, sehingga menimbulkan ketidaktertiban pemanfaatan ruang publik.

Dampak: Akibatnya, terjadi kesemrawutan tata ruang kota, meningkatnya potensi konflik antara aparat dan masyarakat, serta berkurangnya kenyamanan dan kelancaran aktivitas di fasilitas umum.

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

2.2.2.1. Telaahan Isu global

Perkembangan Kecamatan Cicendo Kota Bandung tidak saja dipengaruhi berbagai faktor internal, namun juga eksternal. Faktor eksternal yang dapat diidentifikasi antara lain dinamika lingkungan di tingkat global/internasional, nasional, dan regional. Beberapa isu global yang dapat memengaruhi pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung, antara lain:

1. Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55 persen).
2. Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71 persen. Perkembangan teknologi.
3. Teknologi akan menggantikan sekitar 40 persen pekerjaan saat ini.
4. Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70 persen.
5. Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4 persen per tahun.

6. Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency (CBDB)*, dan *Fintech*.
7. Pertumbuhan kelas menengah (middle class). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90 persen (8,8 miliar).
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.
9. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.
10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.2.2.2. Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029

Pada bagian ini dilakukan penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Visi tersebut memiliki makna bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Misi RPJMN merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai visi. Misi RPJMN disebut juga dengan Asta Cita dan menjadi Prioritas Nasional (PN) tahun 2025-2029, meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong mandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air;

ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender; serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat agama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 2.3 Prioritas Pembangunan
Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

2.2.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Pembangunan jangka menengah Kecamatan Cicendo Kota Bandung merupakan bagian dari pembangunan Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung, memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yaitu:

1. Green dan blue economy;
2. Kualitas dan daya saing SDM;
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar;
4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Keberlanjutan penataan ruang;
6. Kualitas tata kelola pemerintahan.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 adalah:

JABAR ISTIMEWA
Situasi Kondisi Terunggul, Termaju, Paripurna, dan Teratas

Dalam mencapai visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

2.2.2.4. Telaahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029

Setelah memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 lalu selanjutnya memerhatikan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029. Sehingga dalam Pembangunan jangka menengah dan penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2029 dapat sejalan dan selaras dalam penentuan tujuan daerah.

Adapun isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2025-2029 yaitu:

1. Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi;
2. Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi;
3. Pengembangan Transportasi Publik, Dominasi Kendaraan Pribadi, dan Orientasi Transit;
4. Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan;
5. Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia;
6. Ekspansi Ekspor, Dominasi Nasional, dan Posisi Kota Kreatif Global;
7. *Integrasi Smart City dan Dominasi Artificial Intelligence & Internet of Things;*
8. Pengembangan Digitalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
9. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Peningkatan Wisatawan; dan
10. Pelestarian Budaya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Bandung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, TERBUKA, AMANAH, MAJU DAN AGAMIS MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI MELAYANI SERTA BERKELANJUTAN DALAM Mendukung Pembangunan Nasional”

Visi ini menegaskan tekad Kota Bandung untuk membangun dengan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola yang melayani dan responsif. Visi ini juga menjadi jawaban atas tantangan multidimensional, seperti:

- Urbanisasi yang cepat dan tidak merata;
- Kualitas pelayanan publik yang belum merata;
- Ketimpangan sosial dan spasial antar wilayah;
- Persoalan tata lingkungan dan pengelolaan sampah;
- Rendahnya partisipasi dan literasi digital masyarakat dalam proses pembangunan;
- Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan daerah pasca berbagai dinamika kelembagaan.

2.2.2.5. Telaahan KLHS Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2029

Perumusan Isu Strategis di Kecamatan Cicendo diawali dengan identifikasi isu berdasarkan beberapa sumber yang diantaranya:

- a) Isu kondisi lingkungan hidup di Kecamatan Cicendo Kota Bandung;
- b) Isu berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandung;
- c) Isu berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan Kota Bandung;
- d) Isu strategis Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
- e) Isu strategis Nasional berdasarkan dokumen KLHS RPJPN; serta
- f) Hasil pembahasan *focus group discussion* (FGD) ke-1 penyusunan Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Dari keenam sumber sumber tersebut ditetapkan 7 isu rencana kerja strategis di Kecamatan Cicendo Kota Bandung, yaitu:

1. Belum optimalnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat Kecamatan Cicendo;

2. Belum optimalnya implementasi good governance dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan khususnya bidang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Cicendo;
3. Belum optimalnya penegakan ketentraman dalam tata kelola ruang publik
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum di wilayah Kecamatan Cicendo;
5. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan dalam pelayanan kesejahteraan sosial untuk masyarakat di Kecamatan Cicendo;
6. Masih rendahnya tingkat daya saing UMKM di era digital;
7. Masih rendahnya minat daya tarik masyarakat dalam pemanfaatan Buruan Sae di Kecamatan Cicendo;
8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola permasalahan sampah di lingkungan.

Ketujuh isu rencana kerja strategis kemudian diselaraskan dengan isu strategis pada dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, menunjukkan adanya keselarasan sehingga Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 dapat mendorong dalam pencapaian tujuan RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.26 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Cicendo

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu strategis Kota	Isu strategis Kecamatan Cicendo
			Global	Nasional	Regional		
Jumlah penduduk yang cukup banyak dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.	Kesenjangan Akses Layanan Dasar antar Wilayah dan Kelompok Masyarakat	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan akibat pencemaran dan pembangunan yang kurang terkendali	Perkembangan demografi global	Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa masih berada di bawah 50 persen.	Green dan blue economy	Bonus Demografi, Peningkatan Populasi Lansia, dan Transisi Demografi	Kemiskinan, lansia terlantar, stunting di Kecamatan Cicendo
Terdapat pasar induk Caringin dan beberapa gudang logistik yang menjadi pusat kekuatan ekonomi	Pengetahuan pentingnya inovasi produk, pengemasan, dan sertifikasi produk	Tingginya kerentanan terhadap bencana alam, non alam, dan kebakaran belum diimbangi dengan kapasitas adaptasi dan Mitigasi yang memadai.	Geopolitik dan geoekonomi	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah (industri di Jawa masih memiliki rasio robot density 5:10.000, dibandingkan dengan Malaysia 55:10.000 dan Korea Selatan (1.000:10.000).	Kualitas dan daya saing SDM	Dominasi Ekonomi Digital & Kreatif, Ketimpangan Ekonomi, dan Transformasi Teknologi	Keterbatasan lapangan kerja membentuk sekelompok masyarakat yang kurang produktif dan mengganggu ketertiban sehingga menimbulkan perilaku premanisme
Lahan Pemukiman & Kampung yang padat penduduk	Terjadinya banjir dan jalan yang sempit dalam pemukiman	Tingginya kemacetan di Kota Bandung dan transportasi umum yang kurang memadai.	Peningkatan urbanisasi dunia	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir selatan Jawa, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.	Keberlanjutan daya dukung Dan daya tampung lingkungan	Implementasi Kebijakan Hijau, Tantangan Polusi Udara, dan Risiko Degradasi Lingkungan	Timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta belum optimalnya fasilitas pengolahan sampah
Sebagai bagian dari Kota Bandung, maka memiliki kelengkapan fasilitas perkotaan	Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta ketahanan pangan yang mumpuni	Belum signifikannya peningkatan kualitas SDM akibat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata	Konstelasi perdagangan global	Kesenjangan keterampilan dan mismatch pendidikan-industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri, dengan tingkat pengangguran lulusan SMK dan SMA pada 2023 masing-masing sebesar 9,31 persen dan 8,15 persen.	Keberlanjutan penataan ruang	Digitalisasi, Inklusi, dan Tantangan Kesehatan Lansia	Infrastruktur yang kurang memadai

2.2.2.6. Isu Strategis Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan potensi daerah, permasalahan, serta isu lingkungan yang relevan pada berbagai tingkatan (global, nasional, regional, dan kota), Kecamatan Cicendo menetapkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan.

Pertama, isu peningkatan kualitas pelayanan publik muncul seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif. Hal ini sesuai dengan isu global tentang tata kelola pemerintahan dan isu kota terkait digitalisasi layanan publik. Oleh karena itu, strategi yang ditempuh Kecamatan Cicendo adalah memperkuat kapasitas aparatur, memperluas digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan koordinasi antarwilayah.

Kedua, isu pengelolaan sampah. Masalah persampahan yang belum tertangani secara optimal serta keterbatasan lahan sebagai pusat lahan pengelolaan sampah menjadi tantangan. Isu ini terkait erat dengan isu global mengenai program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ketiga, isu penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian penting mengingat jumlah penduduk yang cukup besar harus diimbangi dengan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Hal ini sejalan dengan isu global mengenai perkembangan demografi dan isu kota terkait bonus demografi serta transisi populasi. Dengan demikian, Kecamatan Cicendo perlu merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang terarah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Isu ketahanan pangan. Masalah penguatan ketahanan pangan belum tertangani secara optimal yang disebabkan keterbatasan lahan untuk mendukung program Buruan SAE. Isu ini terkait erat dengan isu global mengenai peningkatan urbanisasi dan isu kota mengenai kebijakan ekonomi hijau serta memperluas penerapan program ketahanan pangan.

Kelima, isu penyediaan infrastruktur dasar menjadi krusial, khususnya terkait pemeliharaan jalan dan penanganan banjir di kawasan permukiman padat. Hal ini mencerminkan isu regional mengenai keberlanjutan daya dukung lingkungan dan isu kota terkait tantangan polusi serta risiko degradasi lingkungan. Strategi Kecamatan Cicendo diarahkan pada peningkatan kualitas sarana prasarana dasar untuk menunjang kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Keenam, isu percepatan pencegahan stunting juga menjadi prioritas. Kurangnya literasi parenting, rendahnya kesadaran pemeriksaan rutin, serta minimnya pendampingan dari dinas terkait, menunjukkan perlunya upaya sistematis. Hal ini sejalan dengan isu nasional tentang mismatch pendidikan dan keterampilan serta isu kota mengenai tantangan kesehatan. Strategi diarahkan pada peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, pendampingan ibu hamil dan balita, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga kesehatan.

Ketujuh, isu penguatan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas karena Cicendo memiliki daya tarik ekonomi dengan lokasi strategis serta pusat perdagangan. Tantangan berupa rendahnya literasi inovasi produk dan sertifikasi masih harus diatasi. Hal ini berkaitan dengan isu nasional mengenai rendahnya pemanfaatan teknologi industri serta isu kota tentang dominasi ekonomi digital dan kreatif. Oleh sebab itu, fasilitasi pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas, daya saing, dan pemanfaatan teknologi.

Kedelapan, isu penegakan keamanan dan ketertiban umum menjadi perhatian strategis bagi Kecamatan Cicendo. Masih ditemukannya praktik premanisme, pelanggaran peraturan daerah, serta kurang optimalnya koordinasi dalam penanganan ketertiban masyarakat menuntut adanya langkah penanganan yang tegas, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan isu nasional mengenai tingginya kerentanan sosial akibat keterbatasan lapangan kerja dan isu kota yang menekankan pada implementasi kebijakan penegakan hukum, pengendalian kawasan, serta pengaturan aktivitas masyarakat di ruang publik.

Rencana strategis pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada periode tahun 2025-2029 memerhatikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal wilayah. Berdasarkan telaahan pada potensi dan permasalahannya, maka dapat dirumuskan rencana strategis pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cicendo;
2. Fasilitasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cicendo;
3. Fasilitasi Penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Cicendo;
4. Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan Cicendo;

5. Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Dasar di Kecamatan Cicendo;
6. Fasilitasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Cicendo;
7. Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan UMKM di Kecamatan Cicendo;
8. Fasilitas Penegakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Cicendo.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Tujuan menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung mencapai visi Kota Bandung, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kota Bandung.

Tujuan pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dari Kecamatan Cicendo menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka sinergitas penjenjangan kinerja pembangunan daerah dengan kinerja perangkat daerah, maka pada bagian ini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung, Nomor 08 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.

VISI KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

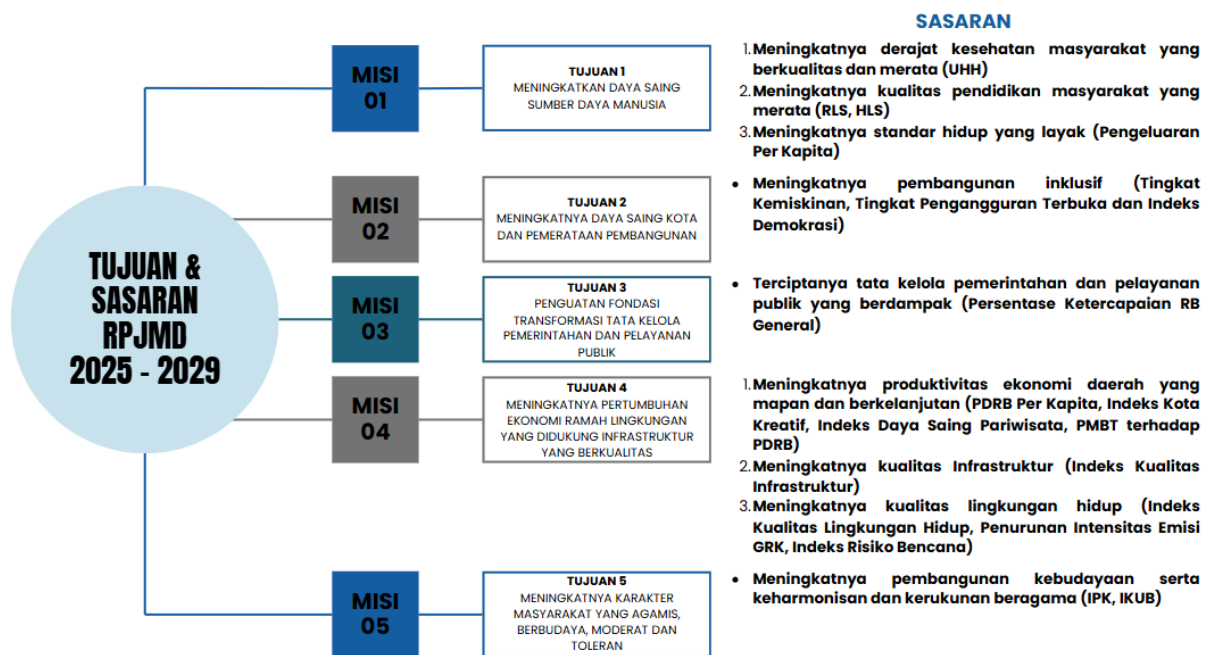
*“Mewujudkan Kota Bandung yang **Unggul**, **Terbuka**, **Amanah**, **Maju** dan **Agamis** melalui Pemerintahan yang Berorientasi Melayani serta Berkelanjutan dalam Mendukung Pembangunan Nasional”*

Gambar 3.1
Misi Kota Bandung Tahun 2025-2029

Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029



Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029



Memperhatikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025-2029 dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Kecamatan Cicendo, maka Renstra Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung Tujuan ke-2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029, yaitu :

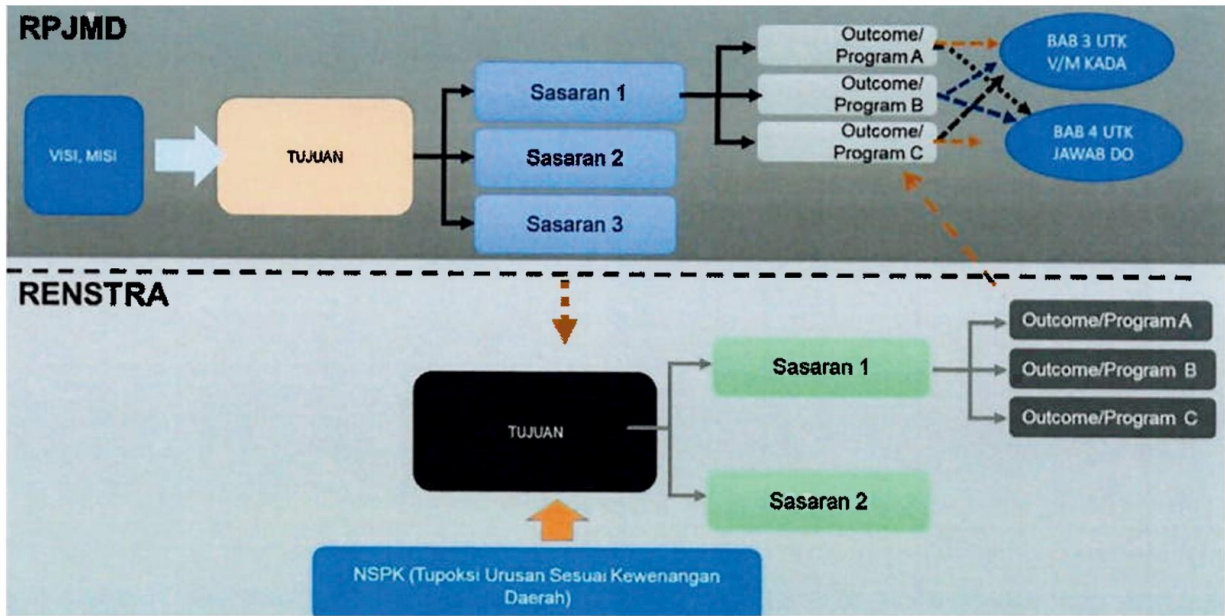
“Meningkatnya Daya Saing Kota dan Pemerataan Pembangunan”

Untuk mendukung pencapaian tujuan ke-2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029 tersebut, Kecamatan Cicendo telah menetapkan 2 (dua) Tujuan pada Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029, yaitu:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah;
2. Meningkatnya Ketentraman Daerah.

Gambar 3.3 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Gambar 3.4 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo



3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, rumusan sasaran dari Kecamatan Cicendo menjadi landasan perumusan indikator sasaran rencana strategis Kecamatan Cicendo.

Sasaran strategis Kecamatan Cicendo selalu diarahkan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sasaran strategis adalah target utama yang lebih terukur dan spesifik dibandingkan tujuan. Fungsi disusunnya sasaran strategis adalah:

- Menjadi dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Menjadi pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan; dan
- Menghubungkan perencanaan teknis Kecamatan Cicendo dengan capaian pembangunan Kota.

Keselarasan hubungan antara sasaran serta indikator Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

**Tabel 3.1 Sasaran Kecamatan Cicendo
Tahun 2025-2029**

Sasaran Kota Bandung	Sasaran Kecamatan Cicendo	Indikator Sasaran Kecamatan Cicendo
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan UTAMA
Meningkatnya Ketentraman Daerah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Satlinmas Aktif

Indikator-indikator diatas digunakan sebagai rujukan dalam proses evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Cicendo. Dengan menetapkan outcome yang jelas dan terukur, Kecamatan Cicendo diharapkan dapat mengarahkan pembangunan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi warga masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi arah dan substansi perencanaan, tujuan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025–2029 disusun dengan memastikan keterkaitan dan penyelarasan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan tingkat daerah. Tabel berikut merangkum

keterkaitan Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo dengan SDGs, RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Kota Bandung Tahun 2025–2045, serta strategi menjaga keselarasannya secara tematik dan substansial.

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

NO	NSPK SASARAN RENSTRA YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasaran Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	88,5	89	89,5	90	90,5	91	
2	Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasaran Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan UTAMA	16,67	50	66,67	83,33	100	100	
3	Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Daerah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Satlinmas Aktif	100	100	100	100	100	100	

3.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT) Kecamatan Cicendo

Kinerja Kecamatan Cicendo sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu organisasi perangkat daerah memahami lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan menentukan strategi serta arah kebijakan yang sesuai. Perangkat daerah harus dapat merespon peluang dari lingkungan eksternal, memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan organisasi dan mengurangi dampak ancaman dari luar, agar dapat mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Dalam rangka merumuskan strategi pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis. Analisis ini mencakup pengkajian terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Cicendo.

1. Lingkungan Eksternal

Faktor eksternal meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum yang memengaruhi Kecamatan Cicendo.

2. Lingkungan Internal

Faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Cicendo dalam mengelola wilayahnya.

Berikut hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Kecamatan Cicendo:

Tabel 3.3 Tabel Analisis SWOT Terhadap Lingkungan

UNSUR 5M	FAKTOR INTERNAL			
	NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
<i>Man</i>	1.	Aparatur Kecamatan memiliki kompetensi dasar pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Tidak seluruh karyawan menghasilkan kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga data kinerja belum tersedia
	2.	Kepemimpinan yang terstruktur, informatif, dan komunikatif	2.	Kapasitas SDM terbatas, khususnya di bidang IT dan manajemen data
<i>Money</i>	1.	Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan	1.	Pelaksanaan anggaran yang belum optimal
<i>Method</i>	1.	Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian	1.	Belum diterapkannya pedoman kerja yang baku (yang mengakomodir berbagai regulasi yang berlaku dan digunakan untuk penilaian)

RENSTRA TAHUN 2025-2029

UNSUR 5M	FAKTOR INTERNAL			
	NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
	2.	Sudah dimulai perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat	2.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan
			3.	Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah
			4.	Belum adanya proses mitigasi masalah yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh bagian
			5.	Pengelolaan asset dan arsip yang belum maksimal
<i>Machine</i>	1.	Tersedianya aplikasi-aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan adanya satu data tanpa harus <i>double input</i>
<i>Material</i>	1.	Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	1.	Sulitnya prosedur penghapusan asset untuk barang yang rusak
<i>Man</i>	1.	Banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif	1.	Kurang optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
			2.	Masih ada Masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitar (seperti belum mau memilah sampah dan membuang sampah di saluran air/gorong-gorong/kali)
<i>Money</i>	1.	Terdapat potensi CSR dan kolaborasi dengan sektor swasta	1.	Masih banyaknya Masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu
<i>Method</i>	1.	Mekanisme penyusunan perencanaan Pembangunan telah melibatkan masyarakat	1.	Perencanaan Pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis permasalahan yang memadai di masyarakat
	2.	Budaya gotong-royong yang masih cukup tinggi	2.	Rendahnya pemahaman masyarakat akan Visi Misi dan Tujuan dari Kota Bandung
<i>Machine</i>	1.	Sudah adanya aplikasi yang digunakan Masyarakat untuk pengumpulan data	1.	Banyaknya Masyarakat yang belum fasih dalam penggunaan teknologi
<i>Material</i>	1.	Sudah adanya program untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi	1.	Belum adanya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum

UNSUR 5M	FAKTOR INTERNAL			
	NO	KEKUATAN (<i>Strength</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
		lingkungan di masyarakat		
			2.	Fasilitas umum yang belum memadai
			3.	Masih banyak wilayah dengan drainase buruk, jalan rusak, dan belum memiliki penerangan jalan

3.4. Strategi Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan pilihan-pilihan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats*). Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi.

Suatu formulasi strategi dapat disusun berdasarkan matriks SWOT dengan mengintegrasikan faktor – faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT berikut:

Tabel 3.4 Tabel Strategi SWOT (SO, ST, WO, WT)

STRATEGI	URAIAN
SO (<i>Strengths-Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan posisi strategis untuk mendorong UMKM dan ekonomi kreatif - Kolaborasi lintas dinas untuk perbaikan drainase dan penghijauan - Gunakan infrastruktur publik untuk digitalisasi layanan
ST (<i>Strengths-Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Gunakan koordinasi dinas untuk menekan konflik sosial - Aparatur kecamatan meningkatkan penegakan aturan ketertiban - Manfaatkan sarana publik untuk mitigasi bencana banjir
WO (<i>Weaknesses-Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Dorong CSR perusahaan sekitar (bandara, hotel, pusat belanja) untuk pembangunan lingkungan - Tingkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan digitalisasi - Gunakan dukungan Pemkot untuk perbaikan sarana prasarana

STRATEGI	URAIAN
WT (Weaknesses-Threats)	<ul style="list-style-type: none"> - Kembangkan sistem peringatan dini banjir berbasis masyarakat - Tambah linmas dan pos kamling untuk mengurangi kerawanan sosial - Perbaiki koordinasi lintas sektor untuk menghadapi keterbatasan anggaran

Tabel 3.5 Matriks Analisis SWOT

	Faktor Internal	Kekuatan/ <i>Strength</i> (S)	Kelemahan/ <i>Weakness</i> (W)
Faktor Eksternal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparatur Kecamatan memiliki kompetensi dasar pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Kepemimpinan yang terstruktur, informatif, dan komunikatif; 3. Anggaran dalam melaksanakan Program dan Kegiatan; 4. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi berbasis pada fungsional dan kinerja yang mengutamakan hasil dan keahlian; 5. Sudah dimulai perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat; 6. Tersedianya aplikasi-aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses pemerintahan dan pelayanan publik; dan 7. Sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai 8. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak seluruh karyawan menghasilkan kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga data kinerja belum tersedia; 2. Kapasitas SDM terbatas, khususnya di bidang IT dan manajemen data; 3. Pelaksanaan anggaran yang belum optimal; 4. Belum diterapkannya pedoman kerja yang baku; 5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan; 6. Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah; 7. Belum adanya proses mitigasi masalah yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh bagian; 8. Pengelolaan asset dan arsip yang belum maksimal; 9. Belum adanya aplikasi yang terintegrasi secara optimal sehingga memungkinkan adanya satu data tanpa harus <i>double input</i>; 10. Sulitnya prosedur penghapusan asset untuk barang yang rusak.

<p>Peluang/ Opportunity (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif Perkembangan teknologi dan sistem informasi; 2. Terdapat potensi CSR dan kolaborasi dengan sektor swasta; 3. Mekanisme penyusunan perencanaan Pembangunan telah melibatkan masyarakat; 4. Budaya gotong-royong yang masih cukup tinggi; 5. Sudah adanya aplikasi yang digunakan Masyarakat untuk pengumpulan data; 6. Sudah adanya program untuk meningkatkan fasilitas dan kondisi lingkungan di Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara internal maupun eksternal, melalui pelatihan agar mampu mengelola teknologi dan regulasi terbaru; 2. Memanfaatkan kepemimpinan yang komunikatif dalam mendapatkan dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta; 3. Mengoptimalkan keterlibatan Masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan; 4. Mengoptimalkan Data Mikro yang merupakan hasil pengolahan data dari seluruh stakeholder; 5. Mengoptimalkan aplikasi yang ada dalam pencapaian tujuan; 6. Mengoptimalkan program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai beban kerja; 2. Pemanfaatan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang IT dan manajemen data; 3. Optimalisasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan; 4. Optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi dengan kolaborasi bersama Masyarakat.
<p>Ancaman/ Threat (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang optimalnya partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; 2. Masih ada Masyarakat yang tidak peduli akan lingkungan sekitar (seperti belum mau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kepemimpinan yang komunikatif dalam mendapatkan partisipasi dan kolaborasi dari masyarakat; 2. Memperkuat mekanisme perhitungan data mikro akan kondisi dan permasalahan di masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pendampingan akan penggunaan teknologi di Masyarakat; 2. Melaksanakan rembuk warga dan musyawarah kelurahan secara rutin untuk lebih mendengarkan permasalahan yang ada di lingkungan Masyarakat;

<p>memilah sampah dan membuang sampah di saluran air/gorong-gorong/kali);</p> <p>3. Masih banyaknya Masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu;</p> <p>4. Perencanaan Pembangunan dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis permasalahan yang memadai di masyarakat;</p> <p>5. Rendahnya pemahaman masyarakat akan Visi Misi dan Tujuan dari Kota Bandung;</p> <p>6. Banyaknya Masyarakat yang belum fasih dalam penggunaan teknologi;</p> <p>7. Belum adanya kesadaran dalam menjaga fasilitas umum;</p> <p>8. Fasilitas umum yang belum memadai;</p> <p>9. Masih banyak wilayah dengan drainase buruk, jalan rusak, dan belum memiliki penerangan jalan.</p>	<p>3. Memperkuat perencanaan Pembangunan dengan memanfaatkan data mikro;</p> <p>4. Mengoptimalkan kolaborasi dengan Masyarakat dalam hal pencapaian Visi Misi Kota Bandung;</p> <p>5. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta dan Masyarakat terkait fasilitas-fasilitas umum.</p>	<p>3. Mengoptimalkan pelaksanaan mitigasi masalah dengan analisis yang memadai di masyarakat;</p> <p>4. Menyempurnakan perencanaan lintas sektor untuk mengoptimalkan perbaikan fasilitas umum di Masyarakat;</p> <p>5. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian masalah asset dan arsip.</p>
--	---	---

Dalam pengukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029, maka dibuat sebuah penilaian keberhasilan yang menjadi target pada setiap tahunnya dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis, Sebagai Berikut:

Tabel 3.6 Keterkaitan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo

Tujuan Renstra Kecamatan Cicendo 2025-2029	Keterkaitan dengan SDGs	Keterkaitan dengan RPJMN 2025-2029	Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029	Strategi Menjaga Keselarasan
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	SDG 16 (Institusi yang Kuat)	Tata Kelola Pemerintahan Digital dan Demokrasi Partisipatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif	Digitalisasi tata kelola (SPBE), sistem reward-punishment ASN dan Informasi keterbukaan layanan publik.
Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) SDG 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur) SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan) SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan)	Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penguatan Ketahanan Sosial	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Penguatan partisipasi peran masyarakat dan Lembaga dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan fasilitas umum sebagai simbol kesetaraan infrastruktur
Meningkatnya Ketentraman Daerah	SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh)	Pemerataan Pembangunan Daerah dan Penguatan kelembagaan	Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan	Penguatan partisipasi peran masyarakat dan Lembaga dalam menjaga gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Tabel ini mencerminkan bagaimana arah kebijakan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Cicendo telah dirancang untuk saling melengkapi dan saling menguatkan dalam sistem perencanaan pembangunan Kota dan Nasional.

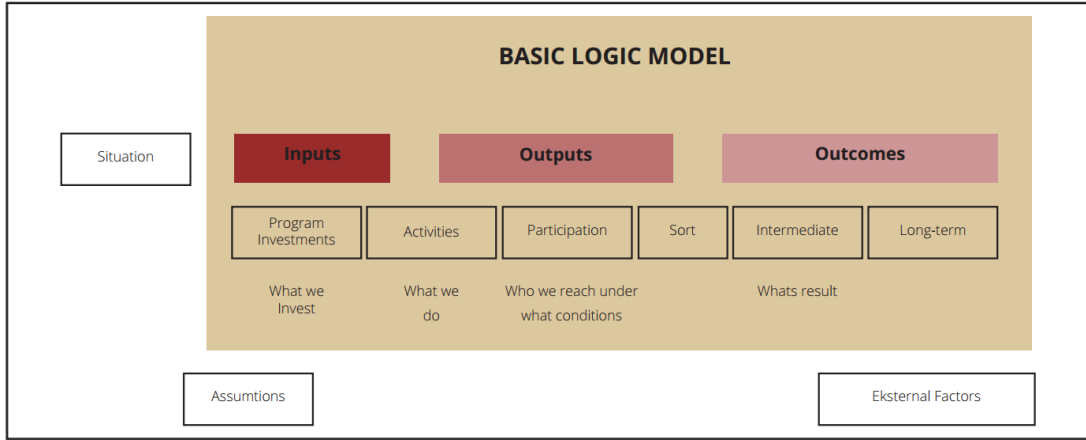
Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan misi pembangunan daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah sehingga dapat memberikan gambaran pelayan kepada masyarakat. Dengan *grand design* yang baik dapat menjawab suatu permasalahan baik yang sudah terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan di kewilayahan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat dan format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi *logic model* dapat dilihat pada gambar berikut:

RENSTRA TAHUN 2025-2029



Gambar 3.5 *Logic Model*

Rencana strategi pembangunan Kecamatan Cicendo akan diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Pengerahan seluruh sumber daya secara kolaboratif dan sinergi akan dilakukan di setiap tahapan pembangunan. Adapun penahapan rencana strategis di Kecamatan Cicendo yang menjadi fokus pembangunan tahunan, disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 3.6 Penahapan Pembangunan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Fasilitasi Penguatan Sistem Persampahan melalui optimalisasi pemilahan sampah, RW KBS, Bank Sampah dan pengolahan sampah lainnya	Perbaikan Penerangan Jalan Lingkungan (PJI) untuk meningkatkan keamanan, dan kenyamanan	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan inovasi produk, serta promosi	Digitalisasi dan Kota Cerdas: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai layanan	Integrasi Nilai Agamis dan Budaya dalam Pembangunan: Memastikan bahwa kemajuan fisik dan ekonomi kota tetap diimbangi dengan penguatan nilai-nilai agamis dan moral masyarakat	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan: Konsolidasi sektor unggulan (pariwisata, ekonomi kreatif, digital) agar terus tumbuh inklusif dan tangguh
Perbaikan dan Pembangunan Jalan lingkungan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat	Fasilitasi penanganan stunting	Fasilitasi Peningkatan keterampilan (vocational training) bagi angkatan kerja agar sesuai kebutuhan industri	Fasilitasi Pengembangan Destinasi dan Event Pariwisata		Penguatan ketahanan dan keamanan sosial masyarakat melalui penguatan sistem perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan wilayah dan ekonomi

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
Penguatan infrastruktur pendukung lain seperti drainase (untuk mencegah banjir) dan sarana air bersih	Fasilitasi pengembangan ruang publik di Tingkat kecamatan/ kelurahan	Penguatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan melalui pengolahan sampah	Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan pariwisata		Penguatan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, budaya lokal, dan etika sebagai pilar integrasi sosial Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis
	Fasilitasi Peningkatan pelayanan Publik Berorientasi Melayani dengan pemanfaatan teknologi				Penguatan kelembagaan dan perencanaan berbasis data untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota
	Penguatan sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan melalui rumah memilah				

3.5. Arah Kebijakan Kecamatan Cicendo dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cicendo tahun 2025-2029

Setelah penetapan tujuan dan sasaran, maka dalam perencanaan strategis dibutuhkan kebijakan atau cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Berikut arah kebijakan yang akan dilakukan Kecamatan Cicendo dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. CICENDO	KET
1	<p>MISI : Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan</p> <p>SASARAN : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo</p> <p>- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib melakukan survei kepuasan masyarakat minimal sekali setahun</p> <p>- Hasil survei dipakai sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.</p> <p>- Survei ini mencakup sembilan unsur pelayanan: persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana & prasarana, dan penanganan pengaduan</p>	Optimalisasi penuntasan kemiskinan	Fasilitasi penuntasan kemiskinan	
		Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif	Fasilitasi Perwujudan sumber daya manusia yang terampil, memiliki keahlian, dan produktif	
		Pemenuhan bantuan sosial secara tepat sasaran	Fasilitasi Pemenuhan bantuan sosial secara tepat sasaran	
		Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Fasilitasi Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	
		Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	Fasilitasi Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.	
		Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Fasilitasi Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Fasilitasi pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
Penurunan ketimpangan gender dalam pembangunan.	Fasilitasi Penurunan ketimpangan gender dalam pembangunan.			
2	<p>SASARAN: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo</p> <p>- Pembentukan satuan pelindung masyarakat (Linmas) di kelurahan berdasarkan aturan teknis dan keputusan Camat dan Lurah</p>	Perwujudan kota yang aman dan tertib	Penguatan Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	
		Optimalisasi Penegakan hukum	Peningkatan Pengawasan dan Patroli Wilayah	
3	<p>SASARAN: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo</p> <p>- Camat/Lurah melalui Satlinmas membantu di tingkat kelurahan/desa.</p> <p>- Pembentukan satuan pelindung masyarakat (Linmas) di kelurahan berdasarkan aturan teknis dan keputusan Camat dan Lurah</p>	Penerapan peraturan daerah demi mendukung Visi dan Misi serta tujuan Pemerintah kota Bandung	Penerapan peraturan daerah demi mendukung Visi dan Misi serta tujuan Pemerintah kota Bandung	
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Fasilitasi Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
		Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima	
		Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KEC. CICENDO	KET
	- Pemerintah Kota Bandung melakukan penindakan melalui Satpol PP dan proses sidang tipiring untuk pelanggaran tertentu	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	
		Perwujudan e-government dan smart city	Perwujudan e-government dan smart city	
		Usulan pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Usulan pemantapan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Perwujudan pemda yang akuntabel dan berorientasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional.	Perwujudan pemda yang akuntabel dan berorientasi hasil dalam mencapai sasaran prioritas daerah dan nasional.	
		Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

Adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Cicendo pada periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan dalam rangka pencapaian 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran kinerja Kecamatan Cicendo periode tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
<p>Dasar : PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan inklusif</p>	<p>Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah</p>	<p>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik kecamatan Cicendo</p>	<p>Persentase Kelurahan UTAMA</p>	<p>Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah</p>	<p>1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan</p>	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</p>	
					<p>2. Nilai SAKIP Kecamatan</p>		
				<p>Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan</p>	<p>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>		<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>
				<p><i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p>	<p><i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p>		<p><i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></p>
				<p>Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>		<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>
				<p><i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i></p>	<p><i>Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN</i></p>		<p><i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i></p>
				<p>Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>		<p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p>
				<p><i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i></p>	<p><i>Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i></p>		<p><i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i></p>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
				<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
				<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>
				<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>
				<i>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>
				<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
				<i>Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>
				<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>	<i>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
				<i>Tersedianya kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
				<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>
				Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan dipelihara</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
				<i>Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
				<i>Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
<p>Dasar: Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan inklusif</p>	Meningkatnya peran inovasi daerah dalam meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik Kecamatan Cicendo	Persentase Kelurahan UTAMA	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Persentase kelurahan yang memenuhi data profil kelurahan di bidang pemerintahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Persentase pemenuhan data profil kelurahan di bidang pemerintahan	
				<i>Terpenuhinya data profil kelurahan bidang pemerintahan</i>	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
				Terselenggaranya pelayanan kependudukan di tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
				<i>Terpenuhinya data profil kelurahan bidang pemerintahan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>
Terlaksananya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkungan kecamatan	Persentase kelurahan yang memenuhi data profil kelurahan di bidang ekonomi dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				<i>Terpenuhinya data profil kelurahan bidang ekonomi dan pembangunan</i>	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	<i>Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>
					Persentase pemenuhan data profil kelurahan di bidang ekonomi dan pembangunan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	.Persentase kelurahan yang memenuhi data profil kelurahan di bidang kesejahteraan social	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
				<i>Terpenuhinya data profil kelurahan bidang kesejahteraan sosial</i>	<i>Persentase pemenuhan data profil kelurahan di bidang kesejahteraan social</i> <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Bidang Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	Persentase Kelurahan Berdaya Jumlah kegiatan yang menunjang kelurahan Berdaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan	
				<i>Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>		<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>
				<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>		<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>
				Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
				<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan</i>		<i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>
				<i>Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	<i>Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>		<i>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>
Dasar: - Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman daerah	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Satlinmas Aktif	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra / IKU	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
<p>dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat - Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pembangunan inklusif</p>				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas yang terbina	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
				<i>Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Kecamatan Cicendo Kota Bandung Tahun 2025-2030 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN/OUT /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
BIDANG KECAMATAN															
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya Kinerja serta kualitas SDM dan layanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan	%	100	100%	19.197.364.831	100%	22.076.969.555	100%	23.180.818.033	100%	24.339.858.935	100%	25.556.851.881	100%	26.834.694.475
	2. Nilai SAKIP Kecamatan Cicendo	Nilai	A	A		A		A		A		A		A	
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	340.218.076	100	391.250.787	100	410.813.327	100	431.353.993	100	452.921.693	100	475.567.778
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	340.218.076	1	391.250.787	1	410.813.327	1	431.353.993	1	452.921.693	1	475.567.778
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	12.435.333.348	100	14.300.633.350	100	15.015.665.018	100	15.766.448.269	100	16.554.770.682	100	17.382.509.216

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	59	59	12.435.333.348	59	14.300.633.350	59	15.015.665.018	59	15.766.448.269	59	16.554.770.682	59	17.382.509.216
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	4	117.427.371	4	135.041.477	4	141.793.551	4	148.883.229	4	156.327.390	4	164.143.759
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	59	59	117.427.371	59	135.041.477	59	141.793.551	59	148.883.229	59	156.327.390	59	164.143.759
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	1.511.772.191	100	1.738.538.020	100	1.825.464.921	100	1.916.738.167	100	2.012.575.075	100	2.113.203.829
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	48.052.533	12	55.260.413	12	58.023.434	12	60.924.605	12	63.970.836	12	67.169.377
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12	775.264.199	12	891.553.828	12	936.131.520	12	982.938.096	12	1.032.085.000	12	1.083.689.250

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.01.2.06.0003	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12	12	81.342.089	12	93.543.402	12	98.220.572	12	103.131.601	12	108.288.181	12	113.702.590
7.01.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	12	365.688.297	12	420.541.542	12	441.568.619	12	463.647.050	12	486.829.402	12	511.170.872
7.01.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	91.994.271	12	105.793.412	12	111.083.082	12	116.637.236	12	122.469.098	12	128.592.553
7.01.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	12	12	17.939.568	12	20.630.503	12	21.662.028	12	22.745.130	12	23.882.386	12	25.076.506
7.01.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	131.491.234	1	151.214.920	1	158.775.666	1	166.714.449	1	175.050.171	1	183.802.680
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	618.469.800	100	711.240.270	100	746.802.284	100	784.142.398	100	823.349.518	100	864.516.993
7.01.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	2	2	618.469.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	2.384.292.362	100	2.741.936.216	100	2.879.033.027	100	3.022.984.678	100	3.174.133.912	100	4,341,043,172
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	218.354.940	12	251.108.181	12	263.663.590	12	276.846.770	12	290.689.108	4	397,608,379
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	9.090.900	1	10.454.535	1	10.977.262	1	11.526.125	1	12.102.431		
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	2.156.846.522	12	2.480.373.500	12	2.604.392.175	12	2.734.611.784	12	2.871.342.373	4	3,943,434,793
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Meningkatnya Kualitas Sarana Prasana Pelayanan Publik	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	1.789.851.682,20	100	2.058.329.434,53	100	2.161.245.906,26	100	2.269.308.201,57	100	2.382.773.611,65	100	2.501.912.292,23

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	20	20	291.834.000	20	335.609.100	20	352.389.555	20	370.009.033	20	388.509.484	20	407.934.959
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	42	42	456.935.600	42	525.475.940	42	551.749.737	42	579.337.224	42	608.304.085	42	638.719.289
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	103.375.593	4	118.881.932	4	124.826.029	4	131.067.330	4	137.620.696	4	144.501.731
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direha bilitasi	Unit	6	6 Unit	1.078.362.463	7 Unit	1.132.280.586	7 Unit	1.188.894.615	7 Unit	1.248.339.346	7 Unit	1.310.756.313	7 Unit	937.706.489
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kelurahan Unggul	Persen	100	100%	7.670.815.948	100%	8.821.438.340	100%	9.262.510.257	100%	9.725.635.770	100%	10.211.917.559	100%	10.722.513.436

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	Persentase RT RW yang laporannya lengkap	Persen.	100	100%	3.736.423.070	100%	3.923.244.224	100%	4.119.406.435	100%	4.325.376.757	100%	3.249.063.539	100%	3.249.063.539
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	4 Dok	3.249.063.540	4 Dok	3.736.423.071	4 Dok	3.923.244.224	4 Dok	4.119.406.435	4 Dok	4.325.376.757	4 Dok	4.325.376.757
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan															
Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan di tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan tepat waktu sesuai SOP	Persen	100	100%	40.623.292	100%	42.654.457	100%	44.787.180	100%	47.026.539	100%	35.324.602	100%	35.324.602
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1 Lap	35.324.602	1 Lap	40.623.292	1 Lap	42.654.457	1 Lap	44.787.180	1 Lap	47.026.539	1 Lap	47.026.539
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum															
Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum di Lingkungan Kecamatan	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan publik terpelihara	Persen	100	100%	4.636.408.620	100%	4.868.229.051	100%	5.111.640.504	100%	5.367.222.529	100%	4.031.659.670	100%	4.031.659.670

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	4 Dok	4.031.659.670	4 Dok	4.636.408.620	4 Dok	4.868.229.051	4 Dok	5.111.640.504	4 Dok	5.367.222.529	4 Dok	5.367.222.529
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat															
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di bidang Kesejahteraan Sosial	Laporan	4	4 Lap	407.983.357	4 Lap	428.382.525	4 Lap	449.801.651	4 Lap	472.291.733	4 Lap	354.768.136	4 Lap	354.768.136
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4 Lap	354.768.136	4 Lap	407.983.357	4 Lap	428.382.525	4 Lap	449.801.651	4 Lap	472.291.733	4 Lap	472.291.733
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Kelurahan Berdaya	Persen	-	33,33 %	6.423.222.117	50%	10.086.409.627	66,67 %	17.507.495.108	83,33 %	17.529.634.864	100%	17.552.881.607	100%	17.577.290.688
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang menunjang kelurahan UTAMA	Kegiatan	n/a	24 Keg	6.056.518.093	272 Keg	9.664.700.000	272 Keg	6.056.518.093	272 Keg	17.064.700.000	272 Keg	17.064.700.000	272 Keg	17.064.700.000
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Keg	n/a	12 Keg	3.218.305.794	56 Keg	6.800.000.000	56 Keg	12.400.000.000	56 Keg	12.400.000.000	56 Keg	12.400.000.000	56 Keg	12.400.000.000
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	n/a	12 Pokmas	2.838.212.299	4 Pokmas	2.864.700.000	4 Pokmas	4.664.700.000	4 Pokmas	4.664.700.000	4 Pokmas	4.664.700.000	4 Pokmas	4.664.700.000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terbina	Persen.	100	100%	366.704.024	100%	421.709.628	100%	442.795.109	100%	464.934.864	100%	488.181.608	100%	488.181.608
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga	4	4	359.213.544	4	413.095.575,60	4	433.750.354,38	4	455.437.872,10	4	478.209.765,70	4	478.209.765,70
7.01.03.2.03.04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1 Lap	7.490.480	1 Lap	8.614.052	1 Lap	9.044.755	1 Lap	9.496.992	1 Lap	9.971.842	1 Lap	9.971.842
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															

RENSTRA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN/OUT PUT	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			KINERJA	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)
Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	Persentase Satlinmas Aktif	Persen	n/a	16,67	2.016.700.839	50	2.319.205.965	66,67	2.435.166.263	83,33	2.556.924.576	100	2.684.770.805	100	2.684.770.805
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Persentase Satlinmas yang terbina	Persen	n/a	16,67	2.016.700.839	50	2.319.205.965	66,67	2.435.166.263	83,33	2.556.924.576	100	2.684.770.805	100	2.684.770.805
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	4	4	2.016.700.839	4	2.319.205.965	4	2.435.166.263	4	2.556.924.576	4	2.684.770.805	4	2.684.770.805

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Terdapat beberapa Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KECAMATAN CICENDO	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA AKSI	KET.
1	PRAKARSA Bandung UTAMA	Program Akselerasi Prioritas Kewilayahan (PRAKARSA) Bandung Utama	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Sampah/Percepatan Pencapaian RW Kawasan Bebas Sampah (KBS); 2. Ketahanan Pangan (RW Buruan Sae); 3. Penanganan Kemiskinan; 4. Penyediaan Infrastruktur Dasar; 5. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting; 6. Penguatan dan Pengembangan UMKM 	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan		
		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
		7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
		Terjaganya kondusivitas daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Satlinmas dan Satkamling Lingkup Kecamatan/ Kelurahan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Siskamling Aktif 2. Penguatan Linmas dan Satpol PP Kota Bandung 	

RENSTRA TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PROGRAM PRIORITAS KECAMATAN CICENDO	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA AKSI	KET.
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	(Kajian Insentif dan Keterlibatan dalam Penataan Kota)	
				7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3. Meningkatkan Peran Linmas dan Gober untuk Mitigasi Kebencanaan 4. Membangun Budaya Ketangguhan dan Tanggap Bencana (Resilience Culture)	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Cicendo

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Cicendo Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan.

Indikator Kinerja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Cicendo untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Cicendo Kota Bandung yaitu:

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Cicendo
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo
2. Persentase Kelurahan UTAMA
3. Persentase Satlinmas Aktif

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

RENSTRA TAHUN 2025-2029

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cicendo Kota Bandung Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target						Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6						7	8
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasaran Kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik Kecamatan Cicendo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cicendo	<p>Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Kecamatan</p> <p>Pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik sesuai Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p> <p>Alat ukur yang digunakan sesuai dengan Permenpan RB No. 14 tahun 2017.</p>	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	88.5	89	89.5	90	90.5	91	Nilai	Semakin tinggi nilai IKM, menunjukkan masyarakat semakin puas terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cicendo
		Persentase Kelurahan UTAMA	<p>Kelurahan disebut sebagai Kelurahan UTAMA jika memenuhi minimal 5 dari 7 (dengan no.1 Wajib) kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran data Laci RW 2. Partisipasi Kewilayahan dalam Infrastruktur Dasar Terpelihara (memenuhi 4 dari 6 kriteria) <ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan jalan di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total panjang jalan rusak (dalam meter); b. Perbaikan saluran air (drainase) di lingkungan masyarakat sebesar minimal 10% dari total drainase rusak; c. Pemenuhan ODF 100%; d. Tersedianya/terbangunnya biopori/drumpori minimal sebanyak 20 titik per RW; 	Jumlah Kelurahan UTAMA dibagi jumlah semua Kelurahan yang ada di Kecamatan dikali 100%	16.67	50	66.67	83.33	100	100	%	Semakin tinggi persentase kelurahan yang memenuhi kriteria UTAMA, menunjukkan semakin baik pula tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Cicendo

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target						Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			<p>e. Tersedianya PJL/PJG pada titik rawan (berkurangnya titik rawan);</p> <p>f. Fasilitasi pembuatan sarana air bersih.</p> <p>3. Partisipasi Kewilayahan dalam Pemenuhan Kelurahan Memilah (memenuhi 3 dari 5 dengan kriteria a dan e menjadi kriteria wajib)</p> <p>a. Terbentuknya RW pemilah sampah (minimal sebesar 50% jumlah rumah setiap RW pada Kelurahan);</p> <p>b. Terdapat pengolahan sampah organik yang aktif (misalnya loseda, kang empos, bata terawang, dll) pada setiap RW;</p> <p>c. Adanya pengolahan sampah (yang aktif) melalui pemanfaatan budidaya magot/ikan lele/ayam pada tingkat Kelurahan;</p> <p>d. Terdapat pengolahan sampah melalui bank sampah yang aktif (skala kelurahan);</p> <p>e. Terdapat buruan sae RW yang aktif (minimal 50% dari jumlah RW tiap Kelurahan)</p> <p>4. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Stunting (4 dari 5 kriteria)</p> <p>a. Adanya program khusus (inovasi kewilayahan) pendorong pencegahan Stunting ;</p> <p>b. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis) atau yang rentan menjadi Ibu Hamil KEK;</p>									

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target						Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			<p>c. Terfasilitasinya makanan tambahan untuk Balita Stunting;</p> <p>d. Terfasilitasinya Posyandu (PMT penyuluhan, Insentif Kader Posyandu, pengadaan peralatan Posyandu);</p> <p>e. Tersedianya laporan TPPS Kelurahan secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya SK TPPS Kelurahan; • Monitoring dan Evaluasi TPPS Kelurahan; • Rembug Stunting tingkat Kelurahan; • Terkumpulnya data sasaran, capaian layanan dan data pendukung berbasis kelurahan. <p>5. Partisipasi Kewilayahan dalam Penanganan Kemiskinan</p> <p>a. Terlaksananya pemutakhiran data sosial ekonomi warga sesuai dengan indikator-indikator pada DTSEN;</p> <p>b. Terlaksananya pengajuan usulan kelayakan kepesertaan DTSEN melalui Musyawarah Kelurahan setiap triwulan;</p> <p>c. Tersedianya peta kantong kemiskinan yang menunjukkan sebaran warga miskin sampai tingkat RW berdasarkan data DTSEN;</p> <p>d. Terfasilitasinya bantuan kepada Warga Miskin yang terdata di DTSEN namun tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah;</p>									

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target						Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			<ul style="list-style-type: none"> e. Terlaksananya penguatan potensi dan kapasitas Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dalam pelaksanaan monitoring, penanganan, dan tindak lanjut aduan sosial masyarakat. f. Fasilitasi pendataan dan pelatihan bagi pengangguran di lingkup RW; g. Fasilitasi pelatihan bagi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) <p>6. Partisipasi Kewilayahan dalam Pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan UMKM dan UMKM Perempuan tingkat RW; b. Fasilitasi NIB, P-IRT, Sertifikasi Halal <p>7. Partisipasi Kewilayahan dalam Kesiapsiagaan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi pembentukan RW Siaga Bencana b. Fasilitasi Mitigasi dan Penanganan Bencana 									

RENSTRA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Target						Satuan	Interpretasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cicendo	Persentase Satlinmas Aktif	<p>Satlinmas aktif Kriteria Satlinmas Aktif adalah secara kumulatif memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Surat Keputusan Penetapan Struktur Organisasi Tata Kerja Satlinmas; 2. Adanya Rencana Kerja Tahunan Satlinmas; 3. Adanya Surat Perintah Penugasan Pelaksanaan Tugas Satlinmas; 4. Daftar Hadir Pelaksanaan Tugas; 5. Laporan Harian Pelaksanaan Tugas; 6. Laporan Tahunan Satlinmas; 7. Minimal mempunyai 25% satkamling tingkat RW yang aktif dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Kepengurusan/ Kelembagaan - Jadwal piket/ronda - Daftar Hadir - Buku Laporan Kejadian 	Jumlah Satlinmas Aktif dibagi jumlah semua Satlinmas yang ada di Kecamatan dikali 100%	100	100	100	100	100	100	%	Semakin tinggi persentase Satlinmas yang aktif, menunjukkan semakin baiknya pembinaan dan pemberdayaan aparatur keamanan di tingkat kelurahan, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Cicendo

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kota Bandung. Dokumen ini merupakan penjabaran dari isu-isu strategis yang ada di Rencana Pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman bagi pejabat struktural, masyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo periode Tahun 2025-2029. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

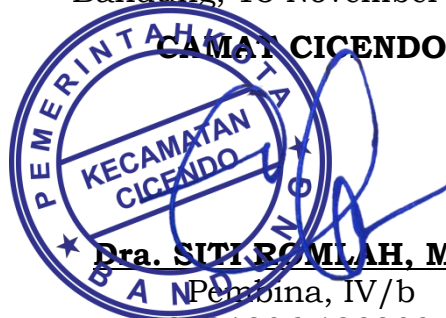
1. RENSTRA Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Rencana Kerja Kecamatan Cicendo harus konsisten dan sinergis dengan dokumen Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.
2. Rencana Kerja Kecamatan Cicendo ini akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di masing masing pemangku jabatan yang ada dilingkungan Kecamatan.
3. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kecamatan Cicendo dan Rencana Kerja di pemangku jabatan dilingkungan Kecamatan Cicendo harus konsisten dengan Renstra Kecamatan Cicendo Tahun 2025-2029.
4. RENSTRA Kecamatan Cicendo akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa dan untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses

RENSTRA TAHUN 2025-2029

perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cicendo Kota Bandung tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pejabat struktural yang ada dilingkungan Kecamatan Cicendo.

Bandung, 13 November 2025



Dra. SITI ROMLAH, M.Si.

BA Pembina, IV/b
NIP. 19691206 198903 2 004

LAMPIRAN

Pohon Kinerja dan Cascading